



Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tak terhingga, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 telah dapat disusun. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan bagi Disparbud Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah di bidang Pariwisata dan kebudayaan. Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok Disparbud Kabupaten Solok. Selain itu Renstra ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan kebijakan nasional dan regional. Dokumen ini berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini, yang telah memberikan bantuan dan sumbang saran yang sangat berharga. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi Disparbud Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah Kabupaten Solok yang lebih baik dan sejahtera.

Arosuka, Desember 2025
KEPALA DISPARBUD



MARCOS SOPHAN, S. Pt, M. Si
NIP. 19740314 199903 1 006

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|----|
| KATA PENGANTAR | i | |
| DAFTAR ISI | ii | |
| DAFTAR TABEL | iv | |
| DAFTAR GAMBAR | v | |
| PERBUB | | |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| 1.1. | Latar Belakang | 1 |
| 1.2. | Dasar ukum Penyusunan | 4 |
| 1.3. | Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.3.1. | Maksud | 6 |
| 1.3.2. | Tujuan | 6 |
| 1.4. | Sistematika Penulisan | 6 |
| | | |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1. | GAMBARAN PELAYANAN | 10 |
| 2.1.1 | Tugas, Fugsi dan Struktur PD | 10 |
| 2.1.2 | Sumber daya PD | 12 |
| 2.1.3 | Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD | 18 |
| 2.1.4 | Kelompok Sasaran Pelayanan | 32 |
| 2.1.5 | Mitra PD Dalam Pemberian Layanan | 33 |
| 2.1.6 | Kerja sama yang menjadi tanggung jawab PD | 33 |
| 2.2. | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | 34 |
| 2.2.1. | Permasalahan Pelayanan Pd | 34 |
| 2.2.2. | Isu Strategis | 37 |
| | | |
| BAB III | TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025-2029 | 39 |
| 3.2 | Strategi dan Arah Kebijakan | 42 |

| | | |
|--------|--|-----|
| BAB IV | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | |
| | 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah | 50 |
| | 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas | 106 |
| | 4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | 107 |
| BAB V | PENUTUP | |

LAMPIRAN

Metadata Indikator Renstra Disparbud Tahun 2025-2029

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 2.1. | Jumlah ASN Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin | 12 |
| Tabel 2.2. | Jumlah ASN Disparbud Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 13 |
| Tabel 2.3. | Rekapitulasi Sarana dan Prasaranan Disparbud | 14 |
| Tabel 2.4 | Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 | 23 |
| Tabel 2.5 | Perkembangan Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 | 30 |
| Tabel 2.6 | Kelompok Sasaran Layanan Disparbud | 32 |
| Tabel 2.7 | Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah | 34 |
| Tabel 2.8 | Teknik Merumuskan Isu Strategis | 38 |
| Tabel 3.1 | Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran | 41 |
| Tabel 3.2 | Tujuan , Sasaran dan Strategi | 43 |
| Tabel 3.3 | Penahapan Renstra | 45 |
| Tabel 3.4 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan | 48 |
| Tabel 4.1 | Teknik Perumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD | 51 |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan | 72 |
| Tabel 4.3 | Daftar subkegiatan prioritas Dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah | 106 |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 110 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | 111 |
| Tabel 4.6 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 112 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Tahapan Penyusunan Rentrsa | 2 |
| Gambar 1.2 | Keterkaitan Renstra dengan dokumen Lainnya | 2 |
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Disparbud | 9 |
| Gambar 2.2 | Komposisi ASN Disparbud berdasarkan Jenis Kelamin | 12 |
| Gambar 2.3 | Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 13 |
| Gambar 2.4 | Grafik Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Solok | 18 |
| Gambar 2.5 | Grafik Rasio PDRB Ekonomi Kreatif | 20 |
| Gambar 2.6 | Grafik jumlah kunjungan wisatwan mancanegara di Kabupaten Solok Tahun 2019-2024 | 21 |
| Gambar 2.7 | Grafik jumlah wisatawan nusantara 2023-2024 | 31 |
| Gambar 2.8 | Grafik Tingkat Hunian Akomodasi | 32 |

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR TAHUN.....
TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH 2025-2029

RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SOLOK

BAB I
PENDAHULUAN

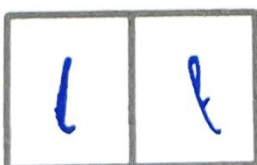
1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

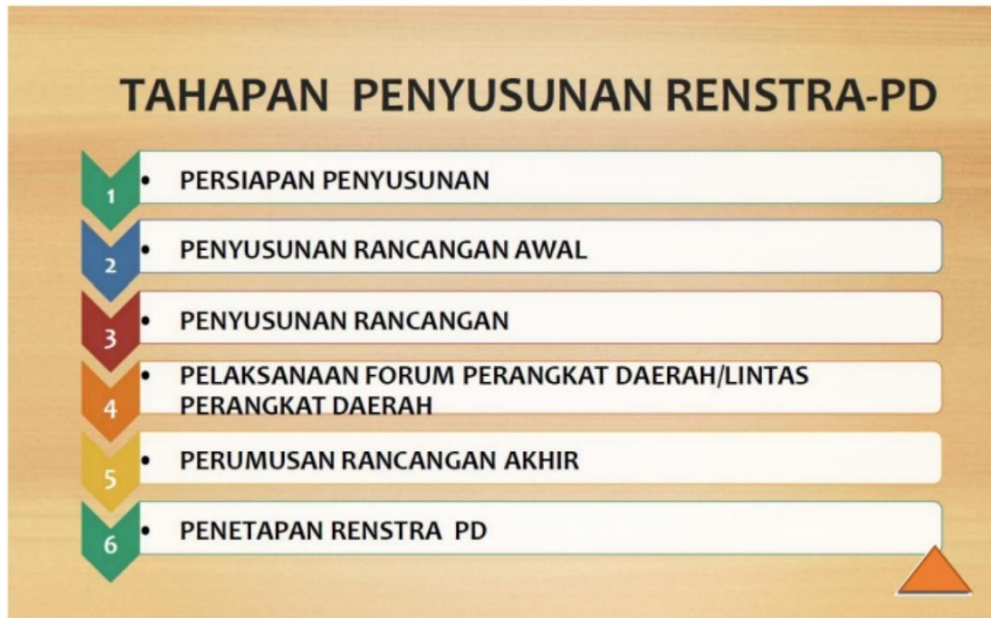
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Keberhasilan capaian Renstra Perangkat Daerah diukur melalui indikator yang telah ditetapkan target tahunannya.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Secara garis besar proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada gambar



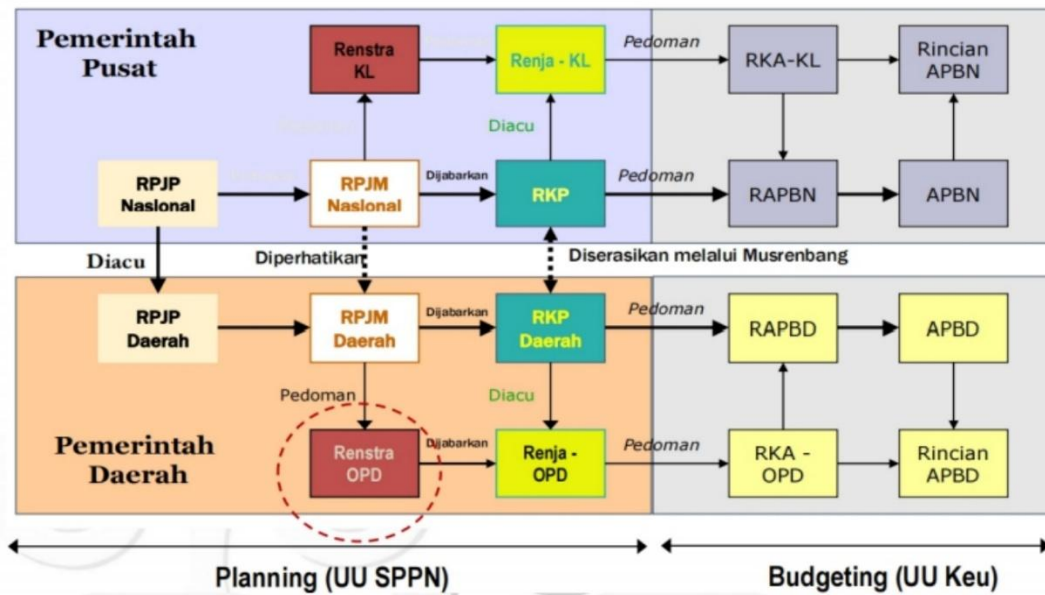
Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra



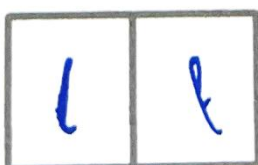
Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra Disparbud disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen Lainnya



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017



Secara rinci tahapan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1. Pembentukan Tim Penyusunan

Tim penyusun Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

a. Orientasi

Orientasi Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

b. Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana kerja Tim Penyusun Renstra Dinas Pariwisata dan kebudayaan disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.

c. Penyiapan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah- langkah, sebagai berikut:

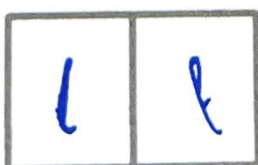
- a. Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
- b. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya , Analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Berita acara forum perangkat daerah.



D. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

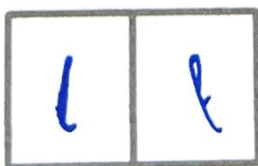
1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Kontrak kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah.

Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/RPJD provinsi/RPJPD kab./kota untuk masa 20 tahun. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/RPJMD provinsi/RPJMD kab./kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah kab./kota. Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/RKPD provinsi/RKPD kabupaten/kota untuk tingkat daerah. Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/Renja perangkat daerah kab./kota.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
- e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;



- s. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- t. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- u. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 penjabaran dari misi Kepala Daerah terpilih dalam mendukung sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, selain itu Renstra juga memiliki tujuan antara lain sebagai berikut adalah :

- a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- c. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

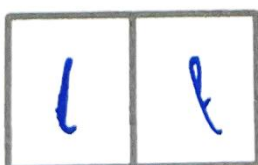
BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Memuat informasi tugas, fungsi dan struktur

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya,



informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

2. Memuat tentang identifikasi permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

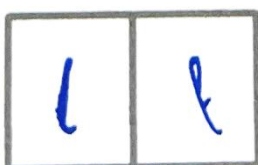
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, kegiatan , subkegiatan beserta kinerja, idikator, target dan pagu indikatif

BAB V PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2016, ditetapkan pada tanggal 06 Desember 2016 yang sebelumnya bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki 2 (dua) kewenangan/ urusan yakni urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.

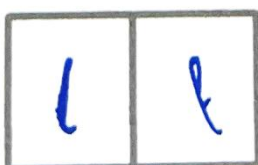
Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

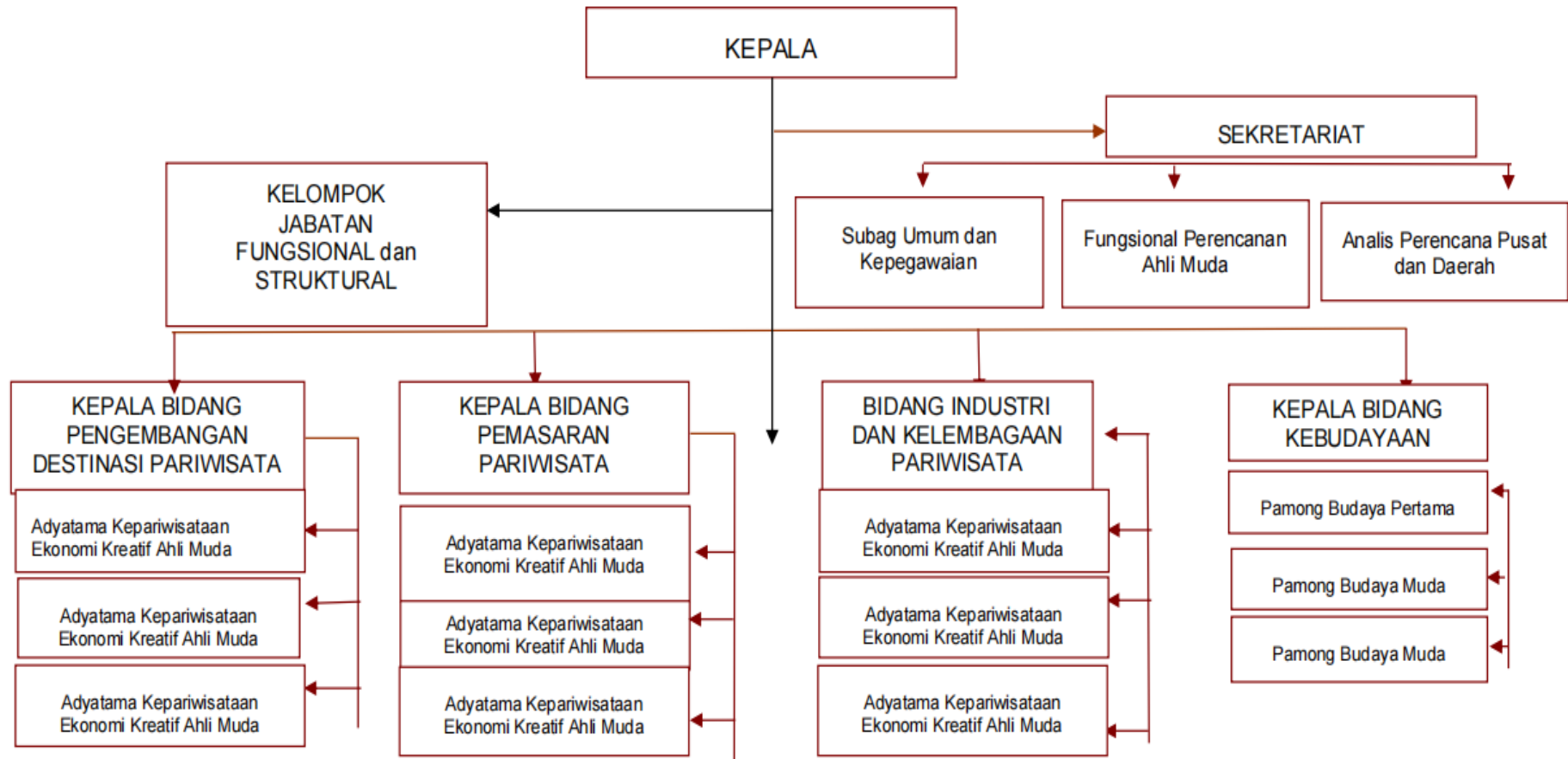
1. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi Disparbud; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Di Mei 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melantik pejabat fungsional yang merupakan penyetaraan dari jabatan pengawas / eselon IV, penyetaraan isi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah.

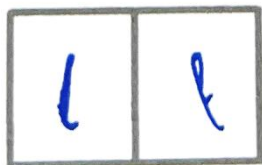
Dengan demikian Disparbud dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien dan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pariwisata dan kebudayaan

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2023 terlihat pada gambar berikut :





Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disparbud



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas, mempunyai tugas :

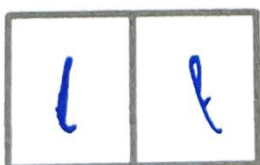
- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif ;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

B. Sekretariat

Tugas pokok sekretariat yaitu merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, aset, kepegawaian, perlengkapan, protokol, organisasi, serta perencanaan program dan kegiatan penatausahaan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian; dan Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi kinerja program, serta pengembangan kegiatan.
 3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



C. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata. Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan pariwisata;

D. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata; dan
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data pasar pemasaran pariwisata.

E. Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata

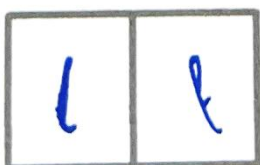
Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pengembangan penyusunan konsep dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di bidang industri dan kelembagaan pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri dan kelembagaan pariwisata;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan industri dan kelembagaan pariwisata;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri dan kelembagaan pariwisata;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta analisis di bidang industri dan kelembagaan pariwisata

F. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pengembangan penyusunan konsep dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kebudayaan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta analisis di bidang kebudayaan.



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Disparbud dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berjumlah 52 orang dengan rincian 23 orang PNS dan 23 orang Non ASN.

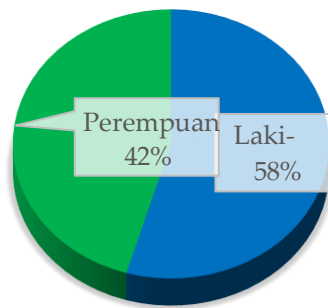
Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Uraian | Laki-laki | Perempuan |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 | - |
| 2 | Sekretariat | 12 | 6 |
| 3 | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata | 7 | 5 |
| 4 | Bidang Industri Pariwisata | 2 | 2 |
| 5 | Bidang Kebudayaan | 3 | 2 |
| 6 | Bidang Pemasaran Pariwisata | 2 | 4 |
| | Jumlah | 27 | 19 |
| | Total | 46 | |

Sumber: DUK Bezeting Disparbud Th 2025

Secara komposisi aparatur Disparbud berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 2.2

Gambar 2.2
Komposisi ASN Disparbud berdasarkan Jenis Kelamin



Disparbud memiliki jumlah aparatur laki-laki yang lebih banyak jika dibanding yang perempuan, dimana aparatur laki-laki berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, sedangkan aparatur perempuan berjumlah 19 (sembilan belas) orang atau dari total keseluruhan aparatur yang ada di Disparbud persentase laki 58% sedangkan perempuan 42%.

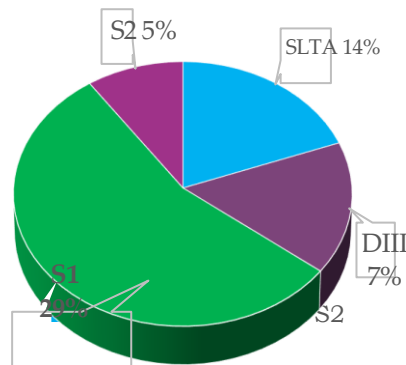


Tabel 2.2
Jumlah ASN Disparbud Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Uraian | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP |
|----|-----------------------------------|----|----|----|------|------|
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | - | | |
| 2 | Sekretariat | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| | Bidang | | | | | |
| 3 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 4 | Bidang Industri Pariwisata | 1 | 3 | - | - | |
| 5 | Bidang Kebudayaan | | 5 | - | - | |
| 6 | Bidang Pemasaran Pariwisata | | 4 | 2 | | |
| | Jumlah | 3 | 25 | 4 | 14 | |
| | Total | 46 | | | | |

Sumber: DUK bezeting Disparbud Mei 2025

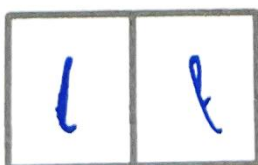
Gambar 2.3
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Keberadaan sumberdaya manusia serta sumberdaya sarana dan prasarana di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memperkuat keberadaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Berdasarkan jenis kelamin jumlah personil laki-laki lebih banyak dari personil perempuan, berdasarkan tingkat Pendidikan Aparatur Disparbud didominasi oleh tamatan S1 sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya

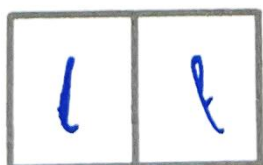
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan, seperti tampak pada tabel berikut

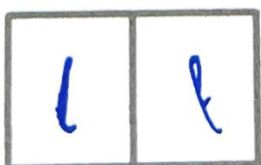


Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Disparbud

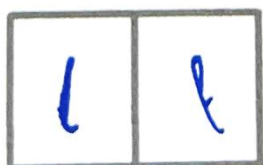
| NAMA BARANG | SATUAN | JUMLA H | KONDISI | | | LOKASI |
|--|--------|------------|---------|------------|-------|----------------|
| | | | Pabrik | rangk a | Mesin | |
| Papan Nama Instansi | Bh | 1 | | | 1 | Alahan Panjang |
| Alat Kantor Lain-lain | Bh | 9 | 9 | | | TIC |
| Kursi Besi/ Metal | Bh | 38 | | 38 | | Alahan Panjang |
| Meja Rapat | Bh | 1 | 1 | | | TIC Kobar |
| Tempat Tidur Kayu | Bh | 8 | | | 8 | Alahan Panjang |
| Meja Telepon | Bh | 6 | | | 6 | Alahan Panjang |
| Meja Resepsionis | Bh | 3 | 3 | | | |
| Meja Marmer | Bh | 1 | | 1 | | Alahan Panjang |
| Meja Tambahan | Bh | 20 | | 20 | | Alahan Panjang |
| Meja ½ Biro | Bh | 8 | 8 | | | TIC Kobar |
| Kasur/ Springbed | Bh | 29 | | | 29 | Alahan Panjang |
| Meja Makan Kayu | Bh | 27 | | 27 | | |
| Kursi Tamu | Bh | 1 | 1 | | | TIC Kobar |
| Sofa | Bh | 20 | | | 20 | |
| Meja Tulis/ Bedcover | Bh | 2 | | 2 | | Alahan Panjang |
| Mesin Penghisap Debu/ Vacum Cleaner | Bh | 5 | | 5 | | Alahan Panjang |
| Mesin Pemetong Rumput | Bh | 6 | 3 | | 3 | |
| Mesin Cuci | Bh | 1 | | 1 | | Alahan Panjang |
| Lemari Es | Bh | 2 | 2 | | | |
| AC Split | Bh | 8 | 8 | | | TIC Kobar |
| Alat Dapur Lain- lain / Dispenser | Bh | 2 | 2 | | | Disparbud |
| Televisi | Bh | 10 | 3 | | 7 | |
| Loudspeaker | Bh | 18 | | | 18 | |
| SoundSystem | Bh | 4 | 3 | | 1 | |
| Microphone | Bh | 2 | 2 | | | |
| Alat Hiasan/ Lukisan | Bh | 4 | 4 | | | TIC Kobar |
| Kaca Hias | Bh | 1 | | 1 | | |
| Lambang Instansi | Bh | 4 | 4 | | | TIC Kobar |
| Karpet | Bh | 2 | | 2 | | |
| Gordyn/ Kray | Bh | 12 | 1 | 11 | | |
| Tangki Air/ Temond | Bh | 10 | 10 | | | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Stand Speaker | Bh | 2 | | 2 | | Disparbud |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Bedcover | Bh | 81 | | | 81 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/Kabel Listrik | Bh | 2 | | | 2 | |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/Box Harcare | Bh | 1 | | | 1 | |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/Meja Wastafel | Bh | 2 | | 2 | | |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/Showerkit/Plastik Vernelkel | Bh | 1 | | | 1 | |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Countainer | Bh | 2 | | | | |



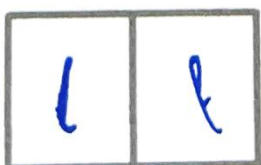
| | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|----------------|
| Sampah | | | | | 2 | |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/Tali Karmatel Adele | Bh | 1 | | | | 1 |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Wc Portable | Bh | 1 | | 1 | | Disparbud |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Wahana Permainan Anak | Bh | 1 | | | | 1 |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Tripod Kamera | Bh | 1 | 1 | | | Disparbud |
| Kursi Pejabat Eselon II | Bh | 1 | 1 | | | |
| Kursi Pejabat Eselon III | Bh | 1 | 1 | | | |
| Kursi Pejabat Eselon IV | Bh | 6 | 3 | 3 | | |
| Lemari Buku Arsip/ Bedrop counter receptionis | Bh | 1 | | 1 | | Alahan Panjang |
| Audio Amplifilier | Bh | 1 | | 1 | | |
| Audio Monitor Active | Bh | 4 | | 4 | | |
| Microphone/ Wirelless MIC | Bh | 4 | | | 4 | |
| Microphone Connector Box | Bh | 1 | | 1 | | |
| Automatic Voltage Regulator (AVR) | Bh | 1 | | | 1 | |
| Power Amplifier | Bh | 7 | | 7 | | |
| Camera/Attachment Drum Set | Bh | 1 | 1 | | | Dispabud |
| Camera Elektronik | Bh | 3 | | 3 | | Disparbud |
| Lighting Stand Tripod/ Stand Lampu | Bh | 2 | | 2 | | |
| Peralatan Studio Vidio dan Film | Bh | 2 | | 2 | | |
| Drone | Bh | 2 | 2 | | | Disparbud |
| Alat Studio Lain-lainnya/Gimbal | Bh | 1 | 1 | | | Disparbud |
| Alat Studio Lain- lainnya/ Camera Digital | Bh | 1 | 1 | | | Disparbud |
| Alat Studio Lain- lainnya/ DSLR MIRROLESS | Bh | 1 | 1 | | | Disparbud |
| Telephone (PABX) | Bh | 1 | | 1 | | Alahan Panjang |
| Alat Komunikasi Lainnya Lain-lain / HT | Bh | 5 | 5 | | | |
| Genset | Bh | 2 | | 2 | | |
| Stabilizer | Bh | 4 | | 4 | | |
| Mainframe (Komputer Jaringan) | Bh | 1 | 1 | | | Disparbud |
| Mini Komputer | Bh | 2 | | 2 | | Disparbud |



| | | | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| P.C Unit | Bh | 2 | 2 | | | Disparbud |
| Laptop | Bh | 22 | 19 | 3 | | |
| Note Book | Bh | 1 | 1 | | | Disparbud |
| Printer (Peralatan Personal Komputer) | Bh | 18 | 13 | 5 | | Disparbud |
| External/Portable Hardisk | Bh | 2 | 2 | | | Disparbud |
| Peralatan Personal Komputer Lain-lain | Bh | 1 | 1 | | | Disparbud |
| Rambu-rambu lalu lintas darat lainnya lain-lain | Bh | 193 | | 193 | | |
| Sepeda | Bh | 1 | | 1 | | Alahan Panjang |
| Lampu – lampu Kristal | Bh | 2 | | 2 | | Alahan Panjang |
| Alat Kantor Lainnya Lain-lain / Kursi rapat ECOS | Bh | 40 | 40 | | | TIC Kobar |
| Kursi Rapat | Bh | 398 | | | 300 | |
| Jam Mekanis | Bh | 3 | 3 | | | TIC Kobar |
| Teko Listrik | Bh | 1 | | 1 | | |
| Microphone Floor Stand | Bh | 4 | | 4 | | |
| Gordyn /Kray | Bh | 188 | 188 | | | |
| Lampu | Bh | 117 | | 117 | | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Asbak Rokok | Bh | 34 | | | 34 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Sajadah | Bh | 34 | | | 34 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya | Bh | 204 | | | 204 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya / Seprei | Bh | 204 | | | 204 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Causen | Bh | 100 | | | 100 | |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Span Draf | Bh | 40 | | | 40 | |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Tali Webbing | Bh | 5 | | 5 | | |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Pengaman Saniyo | Bh | 28 | | | 28 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Wahana Air matras Perosotan | Bh | 15 | | 15 | | Alahan Panjang |



| | | | | | | |
|--|----|----|----|---|----|----------------|
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Carabiner Ultra Tech Screw | Bh | 16 | | | 16 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/Pulley Solo | Bh | 7 | | | 7 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Outbound Sheet Harnest | Bh | 7 | | | 7 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Pulley Tendem | Bh | 5 | | | 5 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Outbound full body harnest | Bh | 8 | | | 8 | Alahan Panjang |
| Peralatan Rumah Tangga Lainnya/ Wahana Boulder water tube | Bh | 7 | | | 7 | Alahan Panjang |
| Mesin Pengering | Bh | 34 | | | 34 | Alahan Panjang |
| Helmet | Bh | 10 | | | 10 | Alahan Panjang |
| Bangunan Gedung Kantor Permanen | Bh | 5 | 5 | | | Alahan Panjang |
| Bangunan Gedung Kantor Lain -lain | Bh | 7 | 7 | | | Alahan Panjang |
| Bangunan Gudang Tertutup Permanen | Bh | 1 | 1 | | | Alahan Panjang |
| Bangunan Gedung Instalasi Lain - lain | Bh | 1 | | 1 | | Alahan Panjang |
| Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | Bh | 3 | | 3 | | Alahan Panjang |
| Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | Bh | 3 | 3 | | | Alahan Panjang |
| Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lain - Lain | Bh | 7 | | 7 | | Alahan Panjang |
| Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | Bh | 1 | 1 | | | Alahan Panjang |
| Gedung Pertokoan /Koperasi/ Pasar Permanen | Bh | 25 | 20 | | 5 | Alahan Panjang |
| Gedung Pos Jaga Permanen | Bh | 3 | | 3 | | Alahan Panjang |
| Gedung Menara Peninjauan Permanen | Bh | 1 | 1 | | | Alahan Panjang |
| Bangunan Terbuka Lain-lain | Bh | 8 | 8 | | | Alahan Panjang |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - lain | Bh | 2 | | 2 | | Alahan Panjang |
| Bangunan Tempat Parkir | Bh | 4 | 4 | | | Alahan Panjang |
| Bangunan Fasilitas Umum Lain -lain | Bh | 6 | | 6 | | Alahan Panjang |



| | | | | | | |
|--|----|----|----|---|--|----------------|
| Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | Bh | 14 | 14 | | | Alahan Panjang |
| Flat/Rumah Susun Semi Permanen | Bh | 1 | | 1 | | Alahan Panjang |
| Bangunan Taman/ Wisata/ Rekreasi | Bh | 1 | 1 | | | Singkarak |
| Tugu Peringatan Lainnya | Bh | 1 | | 1 | | Singkarak |
| Bangunan Menara Pengawas Permanen | Bh | 2 | 2 | | | Singkarak |
| Pagar Permanen | Bh | 1 | 1 | | | Alahan Panjang |
| Pagar Semi Permanen | Bh | 1 | 1 | | | Alahan Panjang |

Sumber: KIB Disparbud 2025

2.1.2 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

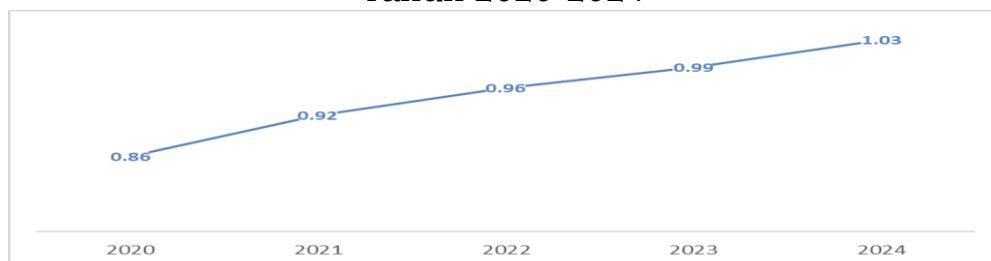
2.1.3.1. Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah tersebut adalah kemampuan ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas wilayah dan infrastruktur dan iklim berinvestasi. Pembentukan daya saing tentu tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, tetapi juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien. Ada beberapa aspek daya saing yang dapat kita ukur pada dinas pariwisata dan kebudayaan.

a. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

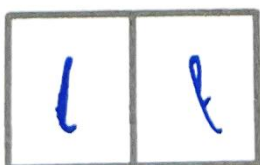
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor akomodasi makan dan minum yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB. Perkembangan rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Solok sepanjang periode 2020-2024 menurut harga berlaku dapat dilihat pada grafik 2.4

Gambar 2.4
Grafik Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Solok Dalam Angka, 2025

Grafik menunjukkan bahwa Rasio PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Solok menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun sempat



menurun tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas luar rumah dan penutupan tempat wisata. Pemulihan ekonomi yang berlangsung sejak 2021 mendorong pemulihan kembali sektor ini, tercermin dari peningkatan nilai PDRB seiring dengan kembalinya mobilitas masyarakat dan naiknya jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan ini menunjukkan eratnya keterkaitan sektor pariwisata dengan kinerja lapangan usaha akomodasi dan makan-minum, yang secara langsung berdampak pada kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

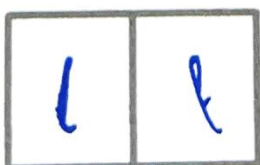
Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Solok adalah 2 hari 1 malam (2D1N), dengan pengeluaran terbesar dialokasikan untuk kebutuhan akomodasi dan konsumsi makan-minum. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan usaha lokal berbasis hospitality, seperti homestay, kuliner tradisional, dan jasa penunjang pariwisata. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengembangan destinasi pariwisata unggulan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, promosi digital, serta penguatan ekosistem ekonomi lokal di sekitar destinasi. Selain itu, perluasan infrastruktur aksesibilitas, termasuk jalan menuju objek wisata dan konektivitas antar wilayah, juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan sektor ini.

Dalam konteks ini, sektor akomodasi dan makan-minum tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat dari sektor pariwisata, tetapi juga menjadi pendorong utama pengembangan ekonomi kreatif daerah. Maka dari itu, strategi lintas sektor yang mensinergikan pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan memperluas dampak ekonominya ke berbagai lapisan masyarakat.

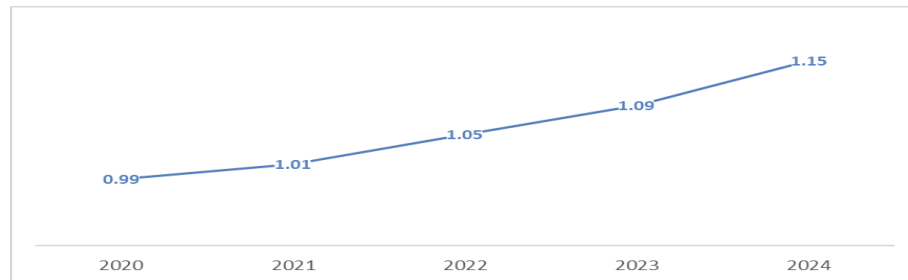
b. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada kreativitas, pengetahuan, dan budaya untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ekonomi kreatif memiliki beberapa ciri, yaitu: Berbasis ide dan kreativitas, Kreativitas dan keahlian sangat dibutuhkan, Kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan, Membutuhkan kolaborasi tidak memiliki batasan.

Produk ekonomi kreatif yang dominan di Kabupaten Solok adalah di subsektor kuliner, fotografi dan videografi. Potensi perkembangan subsektor lain ada diantaranya di subsektor seni pertunjukan. Hal ini tidak terlepas dengan keberadaan sanggar-sanggar di setiap Nagari yang ada di Kabupaten Solok. Hanya perlu pembinaan dan kesempatan untuk mereka mengembangkan kreativitas dalam berkarya. Perkembangan rasio PDRB ekonomi kreatif di Kabupaten Solok sepanjang periode 2020-2024 menurut harga berlaku dapat dilihat pada grafik 2.5



Gambar 2.5
Grafik Rasio PDRB Ekonomi Kreatif



Sumber: Solok dalam angka ,2025

Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 Grafik menunjukkan bahwa rasio PDRB ekonomi kreatif Kabupaten Solok mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari pulihnya aktivitas masyarakat pasca pandemi serta membaiknya angka kunjungan wisatawan, yang berdampak langsung terhadap bergeliatnya subsektor ekonomi kreatif. Sektor pariwisata menjadi katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, terutama di bidang kuliner, fotografi, dan videografi yang mendominasi aktivitas ekonomi kreatif di daerah ini. Selain itu, upaya digitalisasi promosi pariwisata oleh pemerintah daerah turut memperluas jangkauan pasar pelaku ekonomi kreatif, khususnya pelaku UMKM berbasis budaya lokal.

Potensi subsektor lain yang dapat dikembangkan adalah seni pertunjukan, mengingat banyaknya sanggar yang tersebar di setiap nagari di Kabupaten Solok. Keberadaan sanggar ini mencerminkan kekayaan ekspresi budaya lokal yang belum sepenuhnya terangkat secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan dan pemberian ruang ekspresi serta akses pasar bagi pelaku seni lokal agar mampu bertransformasi menjadi pelaku ekonomi kreatif yang produktif. Hal ini sejalan dengan strategi nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan komunitas (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Untuk mendukung penguatan sektor ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini dibiayai melalui DAK, APBD murni, APBD provinsi, serta kerja sama dengan lembaga mitra. Penguatan kapasitas SDM ini menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat kontribusinya terhadap PDRB, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja yang relevan dengan keunggulan budaya dan sumber daya lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangat mempengaruhi nilai Rasio PDRB Ekonomi Kreatif, dengan kata lain ada pengaruh sektor pariwisata yang cukup signifikan pada pengembangan usaha ini. Ditambah lagi dengan telah adanya upaya digitalisasi pemasaran destinasi pariwisata yang dapat diakses oleh Masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk pengembangan destinasi pariwisata daerah untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat dan penciptaan lapangan kerja dan usaha

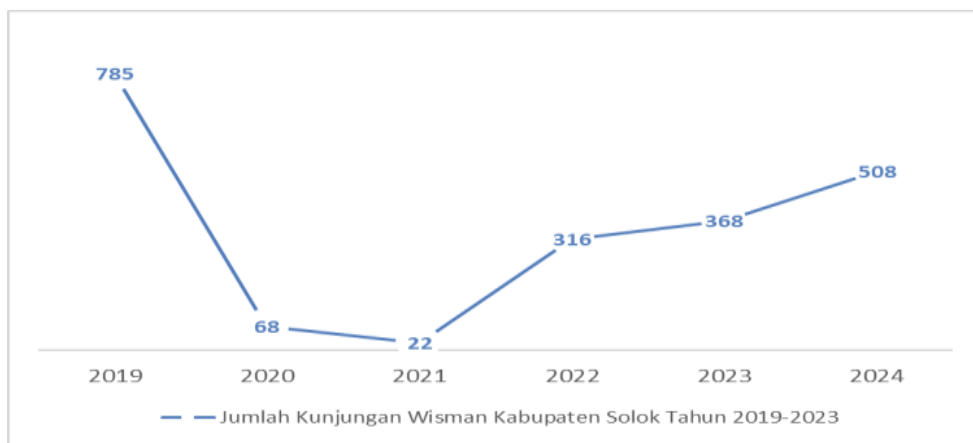


c. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah sangat erat kaitannya terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Kegiatan pariwisata sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun masyarakat.

Gambar 2.6

Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Solok Tahun 2019 – 2024

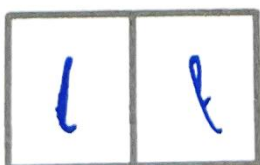


Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kab. Solok Tahun 2024

Jumlah kunjungan tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Solok selama lima tahun ini terjadi penurunan yang sangat signifikan di Tahun 2020 sampai Tahun 2022. Itu terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan seluruh destinasi wisata tutup sehingga jumlah kunjungan wisata baik wisatawan mancanegara maupun domestik mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun di tahun 2023 dan Tahun 2024 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Solok mengalami kenaikan walau belum signifikan yang hanya mengalami kenaikan sebanyak 140 orang. Sebaliknya, kunjungan wisatawan nusantara menunjukkan lonjakan yang sangat positif pasca-pandemi, seiring dibukanya kembali akses destinasi dan meningkatnya tren wisata domestik yang lebih eksploratif serta berbasis pengalaman lokal.

Dengan adanya rute penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dan Singapura, maka wisatawan dari Kuala Lumpur dan Singapura dapat lebih mudah mengunjungi Sumatera Barat, sehingga meningkatkan jumlah wisatawan asing dan itu juga sangat berdampak terhadap kunjungan wisatawan di Kabupaten Solok yang dapat dilihat pada grafik 2.43.

Disamping itu Faktor pendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diantaranya Daya Tarik Wisata: Kabupaten Solok memiliki keindahan alam dan budaya yang unik, sehingga meningkatkan daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Pengembangan Infrastruktur, dengan pembangunan infrastruktur



pariwisata, seperti hotel dan fasilitas pendukung lainnya, dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan. selanjutnya promosi Pariwisata, dengan promosi pariwisata yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Solok.

Secara potensi, Kabupaten Solok memiliki kekuatan pada segmen pasar experience tourism atau wisata berbasis pengalaman. Hal ini ditopang oleh keindahan alam pegunungan, danau, serta kultur masyarakat lokal yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, potensi pada wellness tourism (seperti wisata berbasis ketenangan dan kesehatan) serta gastronomy tourism (wisata kuliner lokal khas Minangkabau) juga menjadi daya tarik tersendiri yang perlu dikembangkan untuk menjaring pasar wisatawan mancanegara secara lebih luas.

Namun demikian, pengembangan pariwisata mancanegara masih menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi promosi, Kabupaten Solok belum memiliki saluran khusus promosi internasional yang terstruktur. Saat ini promosi lebih banyak dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram yang memang memiliki jangkauan global, tetapi belum dimaksimalkan secara strategis dengan pendekatan berbasis segmen pasar. Di sisi lain, ketersediaan akomodasi dan fasilitas pariwisata dengan standar internasional, khususnya dalam hal sanitasi dan kenyamanan, masih sangat terbatas, sehingga perlu perbaikan kualitas infrastruktur destinasi dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata.

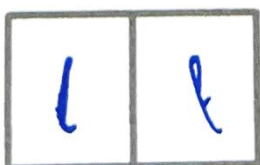
Untuk menjawab tantangan tersebut, ke depan dibutuhkan strategi terpadu berbasis pemetaan potensi destinasi unggulan, penguatan identitas destinasi, serta pengembangan jejaring promosi internasional. Selain itu, pelibatan pelaku usaha lokal, masyarakat.

d. Indeks Pemajuan Kebudayaan

Indikator Indeks Pemajuan Kebudayaan merupakan indikator baru yang dihitung berdasarkan gabungan indikator beberapa program yang meliputi pelestarian kesenian tradisional, pengelolaan sejarah lokal, pengembangan budaya lokal, hingga penetapan dan perlindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, pada dasarnya mencerminkan upaya pelestarian nilai budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan kesenian seperti randai, tari piring, dan sastra lisan Minangkabau, serta kekayaan cagar budaya berbasis sejarah lokal di Kabupaten Solok, sejatinya merupakan modal sosial yang perlu dikapitalisasi sebagai bagian dari pembangunan berbasis identitas kultural.

Penyusunan indikator ini ke depan tidak hanya penting sebagai alat ukur pembangunan budaya, tetapi juga berperan dalam meneguhkan identitas lokal masyarakat Solok di tengah tantangan homogenisasi budaya global. Dalam jangka menengah dan panjang, pemajuan kebudayaan juga dapat dikaitkan dengan pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, serta pendidikan karakter generasi muda.



2.1.3.2 Indikator Kinerja Perurusan

A. Urusan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kabupaten Solok termasuk daerah tujuan wisata dalam Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu -(Ancient Minangkabau Tourism). khususnya Kawasan Pariwisata Alam dan Geowisata Singkarak -Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya.

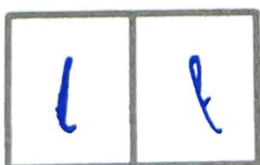
Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Solok dalam hal pariwisata adalah terbangunnya destinasi wisata alam baru dan wisatawan yang akan berkunjung akan disuguhkan dengan pemandangan alam nan elok dengan pesona lima dananya dan suhu udara yang sejuk. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Solok tentunya tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana di sektor pariwisata seperti restoran, penginapan yang belum representatif serta fasilitas destinasi wisata yang belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk memajukan sektor pariwisata. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pembenahan sarana dan prasarana objek wisata di Kawasan Singkarak (Danau Singkarak dan Danau Tuo) dan Danau Kembar (Danau Diatch, Danau Di bawah dan Danau Talang). Perkembangan indikator bidang pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.4
Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata
Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-------|-------|------|-------|-------|
| 1 | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan | 13.64 | 14.52 | 4.69 | 21,32 | 43.36 |
| 2 | Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 13.64 |
| 3 | persentase peningkatan media pemasaran pariwisata | 0 | 0 | 8% | 8% | 26 |
| 4 | persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
| 5 | Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% |
| 6 | persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
| 7 | Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025

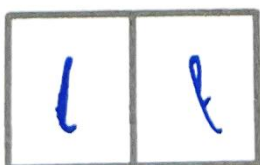


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara yang diikuti oleh peningkatan hunian akomodasi. Ini disebabkan dengan sudah mulai menggeliatnya ekonomi masyarakat pasca covid-19, telah dibenahi sarana dan prasarana penunjang pariwisata, dan juga telah banyaknya dibuka destinasi wisata baru dan juga homestay atau penginapan di Kabupaten Solok, serta telah dilakukan edukasi terhadap pelaku wisata di Kabupaten Solok sehingga pengunjung jadi nyaman saat berwisata di Kabupaten Solok dan yang tak kalah pentingnya yaitu giatnya melakukan Promosi wisata yang efektif melalui media sosial promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dalam maupun luar negeri dan event-event wisata dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Solok. Juga adanya Peningkatan Fasilitas Wisata, Pembangunan fasilitas wisata yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengunjungi Kabupaten Solok.

Peningkatan persentase pertumbuhan industri pariwisata di Kabupaten Solok dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, termasuk industri pariwisata di Kabupaten Solok. Daya Tarik Wisata Kabupaten Solok memiliki keindahan alam dan budaya yang unik, seperti kawasan Danau Singkarak dan Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi daerah ini serta adanya promosi wisata yang efektif melalui media sosial, event- event wisata, dan paket wisata yang beragam dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Solok.

Disamping itu adanya pembangunan infrastruktur pariwisata yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengunjungi Kabupaten Solok. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual di Kabupaten Solok dari tahun 2020 sampai tahun 2023 masih 0 dan untuk tahun 2024 sebesar 8%. Penyebab rendahnya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual di Kabupaten Solok kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. kurangnya Pengetahuan
Banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami pentingnya kekayaan intelektual dan cara melindunginya,
2. Kurangnya Sosialisasi
Pemerintah dan lembaga terkait mungkin belum melakukan sosialisasi yang efektif tentang kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok,
3. Prioritas yang Rendah
Hak kekayaan intelektual mungkin belum menjadi prioritas bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, sehingga mereka lebih fokus pada pengembangan usaha daripada melindungi kekayaan intelektual mereka,



4. Keterbatasan Akses

Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan akses ke informasi dan sumber daya untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka.

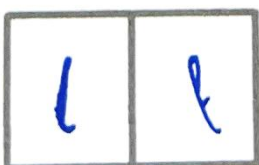
Perluasan produk kreatif di pasar domestik maupun pasar ekspor di Kabupaten Solok masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya Akses Pemasaran: Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan akses ke pasar domestik dan internasional, sehingga mereka kesulitan untuk memasarkan produk mereka.
2. Kualitas Produk: Kualitas produk kreatif di Kabupaten Solok mungkin belum memenuhi standar yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar domestik dan internasional.
3. Kurangnya Inovasi: Produk kreatif di Kabupaten Solok mungkin belum memiliki inovasi yang cukup untuk membedakan diri dari produk lain di pasar.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, seperti keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia, sehingga mereka kesulitan untuk mengembangkan produk kreatif yang kompetitif.
5. Kurangnya Dukungan Pemerintah: Pemerintah mungkin belum memberikan dukungan yang cukup kepada pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan insentif. Pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi di Kabupaten Solok masih rendah.

Penyebab rendahnya pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi di Kabupaten Solok oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran, banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami pentingnya registrasi dan validasi usaha, sehingga mereka tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi, kurangnya akses informasi, pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok masih memiliki keterbatasan akses ke informasi tentang prosedur registrasi dan validasi usaha, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan, selanjutnya proses registrasi yang rumit, proses registrasi dan validasi usaha mungkin terlalu rumit dan memakan waktu, sehingga pelaku ekonomi kreatif enggan untuk melakukan registrasi dan validasi.

kurangnya dukungan pemerintah, pemerintah belum memberikan dukungan yang cukup kepada pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, seperti bantuan teknis, pelatihan, dan insentif, sehingga mereka kesulitan untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi. Disamping itu keterbatasan sumber daya, pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, seperti keuangan dan sumber daya manusia, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.

Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah total PAD di Kabupaten Solok tentunya tidak terlepas dari belum tersedianya sarana dan prasarana di sektor pariwisata seperti



restoran, penginapan yang belum representatif serta fasilitas destinasi wisata yang belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk memajukan sektor pariwisata. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pembenahan sarana dan prasarana objek wisata di Kawasan Singkarak (Danau Singkarak dan Danau Tuo) dan Danau Kembar (Danau Diatch, Danau Di bawah dan Danau Talang).

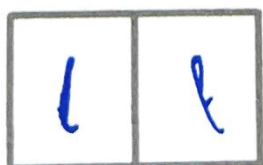
Khusus untuk Kawasan Danau Singkarak karena kawasan singkarak tertuang ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) maka untuk pengembangannya tidak hanya dari APBD saja tapi juga di support melalui APBN. Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali pembangunan untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk kawasan singkarak diantaranya pembangunan menara pandang, panggung kesenian dan kios cenderamata. dan di Tahun 2024 Dermaga Singkarak memperoleh alokasi DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp. 2.769.793.000,- dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitunya Penataan Lansekap dan perlengkapannya, Dermaga Wisata, dan Fasilitas Umum.

Untuk Aksesibilitas menuju KSPN Singkarak bisa melalui jalur udara, darat dan laut. Jalur udara terdapat banyak penerbangan menuju Padang (Ibu Kota Prov. Sumatera Barat). Ruas jalan di masing- masing kecamatan sebagian besar sudah memiliki permukaan aspal.

Sementara untuk amenities KSPN Singkarak dan sekitarnya sudah tersedia hotel, penginapan, Rumah makan, agen perjalanan dan toko cinderamata. Toko cinderamata atau souvenir yang terdapat di kawasan danau singkarak berupa warung-warung yang menjual boneka serta bantal karakter, selain itu juga terdapat warung-warung yang menjual berbagai aneka bilih.

Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Solok memiliki ekosistem yang cukup terbentuk, baik secara atraksi, akomodasi, dan jumlah kunjungan wisatawan. Tahun 2024, share sub sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman tercatat sebesar 1,03%. Jumlah akomodasi yang tersebar di Kabupaten Solok adalah sebesar 145 unit yang terdiri dari hotel, hostel, vila, dan cottage, dengan total jumlah kamar sebesar 1726 kamar dan tersebar di seluruh 14 kecamatan. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok cukup tinggi, rata-rata durasi tinggal wisatawan di Kabupaten Solok masih relatif singkat, yakni rata-rata sekitar dua hari dan satu malam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti masih kurangnya konektivitas dan aksesibilitas menuju tempat atraksi wisata serta masih terbatasnya amenities pada destinasi wisata. Kabupaten Solok memiliki pemandangan alam yang indah dikenal dengan sebutan "Solok Nan Indah", dengan identitas tersebut yang menjadikan Kabupaten Solok merupakan daerah yang sangat menarik bagi wisatawan karena daerah ini mempunyai potensi yang besar bagi wisata alam, wisata sejarah kepurbakalaan, dan wisata di bidang kebudayaan.

Besarnya potensi objek wisata yang dimiliki tersebut diyakini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi.



Kabupaten Solok beriklim tropis dan sejuk mempunyai objek wisata alam yang indah dan objek wisata budaya yang menarik serta wisata minat khusus yang menantang. Wisata alam yang indah didukung oleh 5 buah Danau yaitu, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Singkarak Danau Talang, dan Danau Tuo. Beberapa objek wisata prioritas yang menonjol dengan keindahan alamnya dan menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara antara lain :

KAWASAN DANAU SINGKARAK

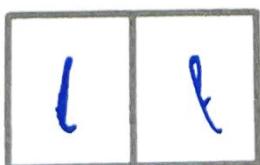
Danau Singkarak merupakan sebuah danau yang membentang di dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki panjang + 2,808 km dan lebar maksimum + 7,715 km dengan luas 129,70 Km². Danau Singkarak terbentuk akibat proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Proses ini menghasilkan cekungan yang terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api yang ada disekitarnya. Cekungan ini dikenal dengan nama lembah Singkarak. Kawasan Danau Singkarak yang sedang dipersiapkan untuk menjadi kawasan geopark. Sesuai dengan perencanaan pengembangan kawasan Danau Singkarak menjadi kawasan Taman Bumi Dunia atau yang dikenal dengan nama UNESCO Global Geopark (UGG).

Danau Singkarak merupakan Danau Terbesar di Sumatera Barat yang secara regional terletak di jalur lintas Sumatera serta merupakan pintu gerbang Kabupaten Solok dari arah utara. selain itu, yang lebih menguntungkan untuk kawasan ini karena berada diantara 2 jalur wisata utama di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi dan Kota Solok. Danau ini dikelilingi bukit-bukit yang hijau dan merupakan tempat yang ideal untuk rekreasi air, tempat bermain anak-anak, berkemah dan lain sebagainya. Danau Singkarak ini yang cocok liburan dan akhir pekan, tersedia beberapa hotel, penginapan, dan restoran untuk pengunjung. Dengan posisi tersebut secara tidak langsung memberi peluang yang besar bagi pengembangan kawasan Danau Singkarak dan bahkan dikunjungi oleh wisatawan nusantara atau mancanegara.

Danau ini mempunyai ikan khas disebut ikan Bilih yang tidak dijumpai di danau-danau lain di Indonesia. ikan bilih tersebut memiliki rasa spesifik dan rasa yang

enak. Di sepanjang pinggiran Danau Singkarak terdapat beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi dengan pemandangan yang menawan. Tempat-tempat tersebut adalah :

- a. Sebuah dermaga dan taman bermain serta pentas medan bapaneh yang sekarang belum didukung dengan fasilitas yang memadai dan status pengelolaan belum jelas antara Pemerintah Daerah dengan Nagari dengan kondisi terakhir yang sangat tidak terawat.
- b. Taluak Indah yang belum didukung dengan fasilitas yang memadai seperti pelataran parkir yang belum luas dan keberadaan sepeda air yang perlu direhab untuk menambah pendapatan daerah.
- c. Rest Area Biteh Kacang dengan kondisi yang belum memadai untuk digunakan sebagai sumber pendapatan dari retribusi daerah.



- d. Lokasi Paralayang yang terletak di Nagari Tanjung Alai dan Tikalak dimana kawasannya belum dibebaskan secara keseluruhan dan kondisi jalan menuju arena masih sempit dan satu jalur sehingga perlu diperlebar.

KAWASAN DANAU KEMBAR (DANAU DIATEH DAN DANAU DIBAWAH) DAN DANAU TALANG

Danau kembar dan Danau Talang berjarak 56 Km dari Kota Padang pada jalur Padang ke Muara Labuh (Sungai Pagu). Danau Kembar dan Danau Talang ini berada pada ketinggian di Pegunungan dan tumbuh menjadi resort yang populer untuk liburan. Udara gunung yang sejuk dan bentang alam yang indah dapat disaksikan dari bukit yang terdapat antara dua danau yang memisahkan danau sejauh 1 Km, dimana satu diantaranya lebih tinggi dari yang lain. Di sekitar Danau Kembar terdapat perkebunan teh dengan pemandangan yang indah dan hijau. Panorama yang sangat mengesankan dari suasana desa di sekelilingnya dan sangat cocok untuk tempat jalan kaki, bersepeda, berkemah, wisata agro, outbond, tempat permainan anak-anak dan juga untuk berkuda. Tersedia beberapa cottage dan Villa untuk menginap yang saat ini berkembang dengan sangat pesatnya.

KAWASAN GUNUNG TALANG

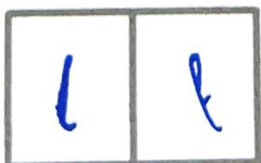
Gunung Talang Merupakan salah gunung yang tinggi di Sumatera Barat dengan ketinggian 2.572 meter diatas permukaan laut. Dari puncak arah barat dapat dilihat pemandangan hamparan perkebunan teh yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara VI Danau Kembar. Kegiatan Pendakian merupakan aktivitas menarik karena pemandangannya yang indah. Dari sini terlihat empat danau yaitu Danau Diateh, Danau Dibawah, Danau Talang dan Danau Singkarak. Pendakian yang merupakan kegiatan petualangan dan olahraga yang menantang memasuki hutan lebat, suasana pegunungan yang dipenuhi oleh tanaman dan udara yang sejuk. pada beberapa lokasi tersedia fasilitas untuk berkemah.

WARISAN TAMBANG BATU BARA OMBILIN SAWAHLUNTO (WTBOS)

Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (WTBOS telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh Unesco pada tanggal 6 Juli 2019 di Kota Baku Azerbaijan.

GEPARK SINGKARAK

Objek wisata di Kabupaten Solok berjumlah 188 buah, yang tersebar di 14 Kecamatan, namun baru sebanyak 11 objek wisata yang ditetapkan sebagai objek-objek wisata unggulan/prioritas. Objek wisata tersebut terdiri dari objek wisata alam dan wisata buatan. Hingga dasawarsa terakhir, Kabupaten Solok masih mengandalkan keindahan alam sebagai modal menjual pariwisata daerah kepada wisatawan. Sementara investasi swasta belum cukup besar yang ditanam pada sektor paling diunggulkan secara nasional pada masa mendatang ini, Kabupaten Solok memang masih memanfaatkan apa yang ada. Tetapi upaya untuk terus "menjualnya" kepada para



investor tidak pernah berhenti. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan selalu dijalankan dengan maksud pengembangan pariwisata, yakni dengan membuka sebanyak mungkin akses jalan ke objek-objek yang masih sulit dalam menjangkaunya atau dalam keterisolasian.

B. Urusan Kebudayaan

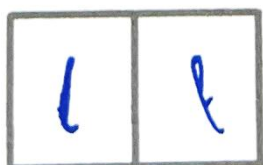
Dalam rangka mendukung kelestarian budaya di Kabupaten Solok maka telah dilakukan berbagai event penyelenggaraan festival seni dan budaya, di Tahun 2022 penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali namun karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 hanya terlaksana 1 (satu) kali. Festival Seni dan budaya Tahun 2022 diantaranya adalah 1) Festival Lima Danau, 2) Gowes Wisata dan Bike Camp Salingka Danau Tahun 2022, 3) Festival Paralayang Silaturahmi Silek Tuo dan Pameran Parekraf. Festival Lima Danau yang merupakan event rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang pelaksanaannya dilaksanakan pada rangkaian hari jadi Kabupaten Solok. Tahun sebelumnya dilaksanakan di masing-masing danau yang ada di Kabupaten Solok.

Pada tahun 2023 Event ini bersifat multi event yang rangkaian acaranya diantaranya:

1. Arak- arakan Bajamba,
2. Pertunjukan Kesenian dan Kebudayaan,
3. Gowes Bersama, dan Lomba Photo.

Benda cagar budaya yang terdata dan terinventarisir di Kabupaten Solok sampai tahun 2023 sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan), namun Benda Cagar Budaya (BCB) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sampai Tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) BCB. Diantaranya Rumah Gadang 20 ruang di Sulik Aie, Balerong Sari di Sulik Aie, Stasiun Kereta Api Kacang di Nagari Kacang, Stasiun Kereta Api Singkarak di Nagari Singkarak, Stasiun Kereta Api Sungai Lasi di Nagari Sei. Lasi, Masjid Tuo Kayu Jao di nagari Batang Barus, Prasasti Paninggahan di Nagari Paninggahan, Makam Syekh Muchsin di nagari sirukam, Makam Syekh Junjungan di Nagari Sirukam dan Makam Dt. Parpatih Nan Sabatang di Nagari selayo, Jadi sampai Tahun 2023 hanya 10 (sepuluh) cagar budaya yang terlestarikan di Kabupaten Solok. Cagar budaya yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2024 karena Kabupaten Solok belum memiliki tim ahli cagar budaya.

Untuk sarana penyelenggaraan Seni dan budaya masih belum ada Penambahan masih tetap 5 unit, diantaranya berlokasi di Dermaga Singkarak ada 2, di Kacang 1, di Alahan Panjang Resort 1 unit dan di Nagari Jawi-jawi 1 unit. Kesenian yang dilestarikan semakin meningkat, dimana pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 13,8% dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 26,5% disebabkan banyaknya muncul sanggar dan group seni seiring dukungan dan adanya panggung yang disediakan pemerintah daerah dalam bentuk event- event kesenian dan budaya. Perkembangan Indikator kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.6



Tabel 2.5
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan
Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Terlestariannya Cagar Budaya (Cagar Budaya) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan/dilestarikan | 13,8 | 15,9 | 19,1 | 21,2 | 26,5 |
| 3 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

Dari tabel 2.5 dilihat bahwa Pelaksanaan festival seni dan budaya ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Nagari dan Komunitas. Penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mempromosikan destinasi pariwisata. Dengan Mempromosikan destinasi pariwisata melalui kegiatan (event) yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan wisatawan nusantara agar berwisata di Kabupaten Solok.

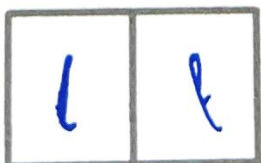
Beberapa penyelenggaraan festival seni dan budaya di Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Daerah diantaranya Fun Camp dan Launching Calender of Event Kabupaten Solok di Pesanggrahan Singkarak, Pacu Biduak Tradisi di Pesanggrahan Danau Singkarak, Pemilihan Bujang jo Gadih Duta Pariwisata Kabupaten Solok, Event Sumarak Salingka Danau, dan beberapa Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan oleh nagari Event Alek Nagari Sirukam, Festival 3 Embung Nagari Gaung, Event Sumarak Pulang Basamo Rang Paninggahan Baralek Gadang dan Event Trabas Tanjung Alai Adventure (TAJAM X) 2023 di Lereng Green View Nagari Tanjung Alai.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan oleh Komunitas diantaranya Pentas Seni oleh Perguruan Silek Pangka Bajalan Nagari Sirukam. Budaya lokal yg di kembangkan meningkat dari tahun 2020 sebanyak 20, menjadi 35 pada tahun 2024, disebabkan karena adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya lokal

2.1.3.3 Indikator Kinerja LPPD

1) Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Solok

Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara adalah: Tingkat perubahan atau pertumbuhan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada suatu periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Di sini yang dihitung adalah perjalanan (trip) yang dilakukan oleh wisatawan domestik (penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri), bukan jumlah orangnya.



Rumusnya:

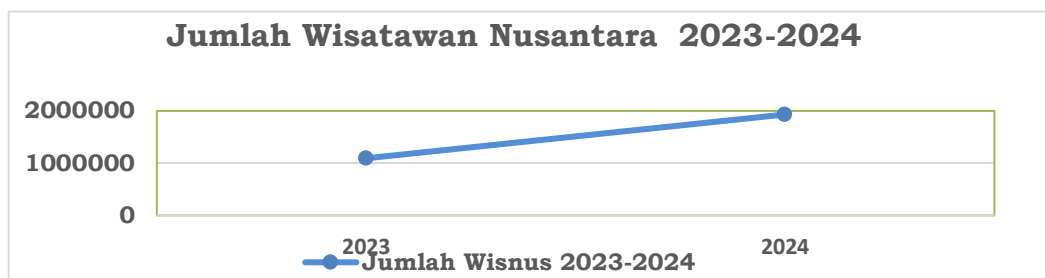
| | |
|-----------------|--|
| Peningkatan (%) | Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 X 100% |
| | Jumlah wisatawan n-1 |
| | |

Keterangan :

Jumlah wisatawan tahun n = jumlah wisatawan nusantara pada periode sekarang

Jumlah Wisatawan n-1= jumlah wisatawan nusantara pada periode sebelumnya

Gambar 2.7
Grafik Tamu Wisatawan Nusantara



Sumber: Disparbud, 2025

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara Perkebangaan meningkat sebesar 76,57% , yaitu dari 1.094.142 pada tahun 2023 meningkat menjadi 1.931.959 ditahun 2024.

2) Tingkat Hunian Akomodasi

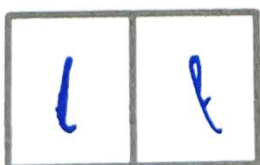
Tingkat Hunian Akomodasi Kabupaten Solok adalah Persentase rata-rata pemanfaatan kamar atau unit akomodasi (hotel, penginapan, homestay, dan jenis akomodasi lainnya) yang tersedia di wilayah Kabupaten Solok dalam periode tertentu. Indikator ini menggambarkan seberapa besar kapasitas akomodasi digunakan oleh tamu atau wisatawan dibandingkan dengan total ketersediaannya.

Rumusnya:

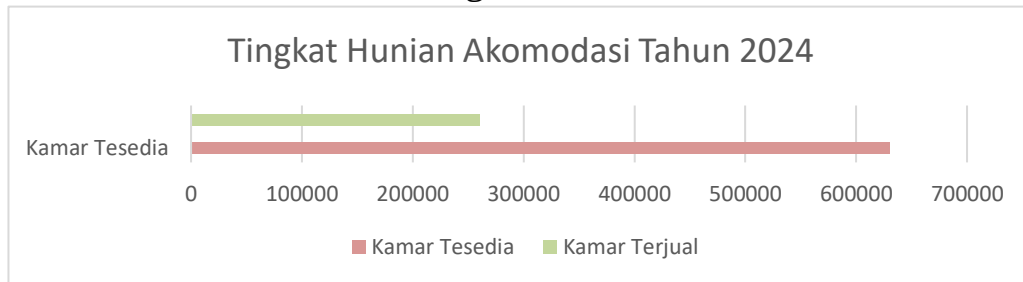
| | | |
|--------------------|----------------------------|--------|
| Tingkat Hunian (%) | Jumlah Kamar yang terjual | X 100% |
| | Jumlah Kamar yang tersedia | |

Keterangan:

- Jumlah Kamar/Unit Terjual/Terpakai = jumlah kamar yang ditempati tamu dalam periode tertentu
- Jumlah Kamar/Unit Tersedia = total kamar yang tersedia untuk dijual/disewakan dalam periode yang sama



Gambar 2.8
Grafik Tingkat Hunian



Sumber: Disparbud,2025

Tingkat hunian akomodasi adalah sebesar 41 % , jumlah kamar tersedia yanitu 629.990 kamar dan yang terjual adalah sebanyak 260.177 kamar.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Disparbud Kabupaten Solok sesuai dengan tugas dan fungsi Disparbud sebagai unsur penunjang adalah sebagai berikut.

Tabel. 2. 6
Kelompok sasaran layanan Disparbud

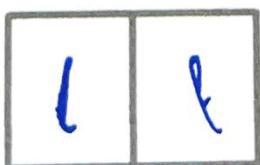
| NO | Bidang | Kelompok Sasaran Pelayanan |
|----|--|--|
| 1 | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata | Kelompok Sasaran Pelayanan bidang Pengembangan Destinasi Parwiwsata adalah : Pengelola Objek Wisata, Pelaku Pariwisata, dan Masyarakat Umum |
| 2 | Bidang Pemasaran Pariwisata | Kelompok Sasaran pelayanan bidang Pemasaran adalah : Pentahelik, Masyarakat Umum, Duta Wisata |
| 3 | Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata | Kelompok Sasaran pelayanan Bidang industry dan Kelembagaan adalah : Pelaku Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kelompok Sadar Wisata, dan Masyarakat Umum. |
| 4 | Bidang Kebudayaan | Kelompok Sasaran pelayanan Bidang Kebudayaan adalah : Pelaku seni, Lembaga kebudayaan, pengelola cagar Budaya, dan Masyarakat Umum. |

2.1.5 Mitra Sasaran Layanan

PENTAHELIX merupakan Mitra Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam pemberian layanan dengan melibatkan lima elemen kunci:

A. Mitra antar perangkat daerah (Pemerintah Daerah)

1. Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, dan Media
2. Bappeda → perencanaan pembangunan pariwisata dan budaya. Dinas PUPR → pembangunan infrastruktur jalan, akses destinasi, gedung kebudayaan.
3. Dinas Perhubungan → transportasi wisata (darat, udara, laut).
4. Perdagangan/Perindustrian/UMKM → pengembangan ekonomi kreatif, produk oleh-oleh.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika → promosi digital, branding daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup → kelestarian lingkungan destinasi wisata.
7. Dinas Pertanian/Perikanan → wisata agro, kuliner lokal, wisata bahari.



8. Dinas Pendidikan → edukasi budaya, penguatan kearifan lokal di sekolah.

9. Dinas Koperasi → pemberdayaan usaha masyarakat sekitar destinasi.

B. Mitra Non- Pemerintah

1. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) → pengelola destinasi berbasis masyarakat.

2. Pelaku seni dan budaya (sanggar, komunitas, budayawan) → pelestarian tradisi.

3. Asosiasi pariwisata (PHRI, ASITA, HPI, dll.) → promosi dan pelayanan wisata.

4. Perguruan tinggi & lembaga penelitian → riset, inovasi, dan pelatihan SDM pariwisata.

5. Perbankan/lembaga keuangan → pembiayaan usaha pariwisata.

6. Swasta/investor → pembangunan hotel, restoran, resort, wahana wisata.

7. Media massa & digital platform → promosi pariwisata.

8. LSM/komunitas lokal → pemberdayaan masyarakat

2.1.6 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bisa melakukan KAD dalam hal:

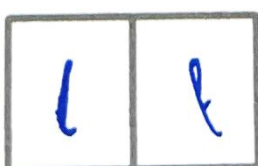
Pengelolaan destinasi wisata bersama, seperti kawasan wisata Danau Singkarak dengan pengelolaan antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar

b. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat

Bentuk kerjasamanya adalah :Pengembangan destinasi super prioritas atau strategis nasional yaitu Destinasi Danau Singkarak yang merupakan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).

c. Kerjasama dengan pihak swasta

Bentuk kerjasamanya yaitu sponsorship dan co-branding dalam promosi pariwisata seperti dengan Bank Nagari, BSI, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Tirta , BPJS Kesehatan, PTPN VI Danau Kembar

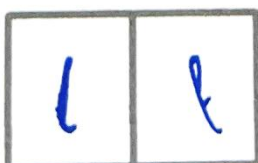


2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Tabel 2.7
Pemetaan permasalahan untuk penentuan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH | |
|--|---|--|--|
| masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian | Belum optimalnya daya saing sektor pariwisata | Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata | |
| | | Belum optimalnya sarana dan prasarana | |
| | | Belum optimalnya pemasaran di sektor pariwisata | |
| | | Masih kurangnya dukungan Masyarakat | |
| | | Masih kurangnya kemitraan dengan stakeholder terkait | |
| | | Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM | |
| | | Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi | |
| | | Masih kurangnya penyelenggaraan event | |
| | | Belum optimalnya pengembangan seni budaya Lokal | |
| | | belum merata investasi sektor pariwisata | |
| | Masih rendahnya daya saing ekonomi kreatif | | Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM |
| | | | Masih rendahnya pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual |
| | | | Masih kurangnya sarana dan prasana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif |
| | | | Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi |
| | | | Masih terbatasnya akses Permodalan |
| | | | Belum optimalnya pemasaran |



| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|--|---|--|
| Melemahnya implementasi nilai adat, budaya kehidupan | Kurangnya dukungan pemerintah untuk pelestarian adat, budaya dan cagar budaya | Terbatasnya perhatian pemerintah terhadap isu pelestarian adat, budaya dan cagar budaya karena keterbatasan anggaran |

Sumber: Disparbud, 2025

2.2.1 .1 Permasalahan Urusan Wajib Kebudayaan

Permasalahan dalam urusan wajib kebudayaan di Kabupaten Solok berkisar pada minimnya anggaran, tumpang tindih kewenangan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, tantangan juga muncul dalam hal penetapan dan pengelolaan cagar budaya, serta dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan secara keseluruhan, seperti : Anggaran, alokasi yang sering tidak memadai, sehingga menghambat berbagai kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, anggaran kebudayaan kalah prioritas dibandingkan dengan sektor lain sehingga dana yang tersedia terbatas dan tidak mencukupi.

Sumber Daya Manusia, kurangnya tenaga ahli dibidang kebudayaan, seperti arkeolog, kurator dan ahli konservasi menjadi kendala dalam pelestarian dan pengelolaan situs dan benda cagar budaya. Kesadaran Masyarakat, seringkali kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian kebudayaan dan kurang aktif dalam mendukung upaya pelestarian. Disamping itu perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat juga dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal, seperti: penggunaan pakaian adat daerah, penggunaan kato nan ampek, mudarnya budaya gotong royong, tergerusnya etika dan sopan santun generasi muda, dan terkikisnya pemahaman dalam penerapan abs - sbk.

2.2.1.2 Permasalahan Urusan Pilihan Pariwisata

Permasalahan pariwisata di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya : Masih Rendahnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata, Pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat pengembangan pariwisata daerah. Belum Optimalnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Daya saing sektor pariwisata Kabupaten Solok belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Belum Optimalnya Pengelolaan Destinasi Wisata: Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Solok belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata: Sarana dan prasarana destinasi wisata di Kabupaten Solok belum optimal, sehingga dapat

menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Belum Optimalnya Pemasaran: Pemasaran pariwisata Kabupaten Solok belum optimal, terutama dalam jumlah even dan promosi online, sehingga tidak



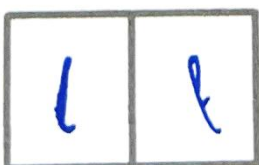
dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan.

Permasalahan lainnya terkait pariwisata Kabupaten Solok adalah Masih Kurangnya Dukungan Masyarakat, Dukungan masyarakat dalam pariwisata daerah masih kurang, sehingga dapat menghambat pengembangan pariwisata. Masih Kurangnya Kemitraan dengan Stakeholder Terkait, Kemitraan dengan stakeholder terkait masih kurang, sehingga tidak dapat meningkatkan pengembangan pariwisata.

Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata: Kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha pariwisata belum optimal, sehingga dapat menurunkan kualitas layanan pariwisata. Masih Rendahnya Minat Investor: Minat investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata masih rendah, sehingga dapat menghambat pengembangan pariwisata. Belum Optimalnya Pemanfaatan Digitalisasi: Pemanfaatan digitalisasi dalam pariwisata Kabupaten Solok belum optimal, sehingga tidak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran pariwisata. Belum Optimalnya Pengembangan Seni Budaya: Pengembangan seni budaya dalam pariwisata Kabupaten Solok belum optimal, sehingga dapat menurunkan kualitas pengalaman wisatawan.

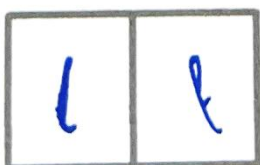
Permasalahan ekonomi kreatif di Kabupaten Solok cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain Masih Rendahnya Daya Saing Ekonomi Kreatif, Daya saing ekonomi kreatif di Kabupaten Solok masih rendah, sehingga menghambat pengembangan ekonomi kreatif daerah. Masih Rendahnya SDM Pelaku Ekonomi Kreatif, Kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha kreatif. Masih Rendahnya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Intelektual, Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Masih Kurangnya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif), Kurangnya prasarana seperti zona kreatif, ruang kreatif, atau kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif.

Permasalahan lainnya terkait ekonomi kreatif di Kabupaten Solok Kurangnya Dukungan Infrastruktur: Kurangnya dukungan infrastruktur seperti jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya dapat menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Kurangnya Kemitraan dengan Stakeholder, Kurangnya kemitraan dengan stakeholder terkait dapat menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Masih Rendahnya Pemanfaatan Digitalisasi, Pemanfaatan digitalisasi dalam ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran produk kreatif.



2.2.2 Isu Strategi

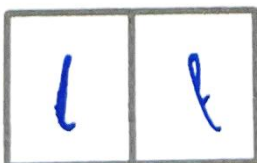
Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Isu strategis dapat menentukan tujuan pada perangkat daerah. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan dan potensi kedepan, yang meliputi aspek budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai beberapa Isu yaitu dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.



Tabel 2.8 Teknik merumuskan Isu Strategis

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINASMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS |
|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Urusan Kebudayaan | 1. Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan daerah untuk menunjang perekonomian masyarakat | | Dorongan perlindungan warisan budaya tak benda sesuai konvensi UNESCO | Banyaknya warisan budaya yang belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara memadai | Tantangan menjaga Eksistensi adat dan nilai budaya lokal ditengah perubahan sosial | Pelestarian budaya lokal dan adat istiadat |
| Urusan Pariwisata | Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata | Belum optimalnya pemanfaatn potensi daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif | Pariwisata berkelanjutan, dampak perubahan iklim terhadap Destinasi Wisata, Digitalisasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru dalam persaingan desninasi global | Transformasi pariwisata nasional , pemulihan dan ketahanan sektor pariwisata , pengembangan Ekraf daerah, dan Digitalisasi promosi pariwisata serta keterkaitan Pariwisata dengan UMKM | Daya Saing Diferensiasi Destinasi daerah dengan peningkatan promosi dan event daerah | Peningkatan daya saing dan diferesniasi Destinasi daerah dengan meningkatkan kusstksn infrastruktur dan amenitas pariwisata,serta pengelolaan dan kelembagaan dengan pengembangan ekonomo kreatif lokal |

Sumber: Disparbud,2025



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu perumusan tujuan perangkat daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

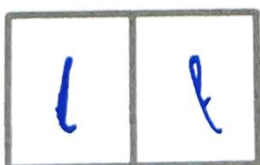
Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbang 2025-2029, perlu dilakukan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Tujuan dan sasaran ini akan menjadi acuan bagi Bapelitbang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Visi dan misi yang menjadi dasar serta acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029 adalah visi dan misi serta janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029 yang terpilih. Oleh sebab itu visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2025-2029 yang terpilih langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU
MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”**

Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan yakni : Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dijelaskan sebagai berikut ;

- a. “Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
- b. “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan



agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

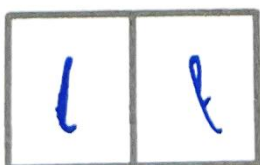
- c. “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut

Misi 3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Misi 4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

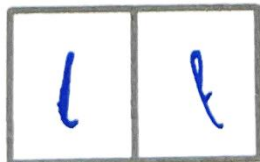
Untuk implementasi visi dan misi maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan.



TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|--|--|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | |
| - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai-nilai agama berlandaskan ABS SBK - Meningkatkan pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal | Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal | | Cakupan Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif (%) | 2,18 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,71 | |
| | | | Indek kemajuan kebudayaan (Indeks (Skala 0-100)) | 99 | 1,41 | 1,93 | 3,25 | 3,94 | 4,47 | 5,00 | |
| | | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 1,025 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,42 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) | 0 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,1 | 1,09 | 1,29 | |
| | | Terwujudnya berkebudayaan maju | persentase pembangunan kebudayaan (%) | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 72,60 | 73,15 | 73,65 | 74,15 | 74,65 | 75,15 | 75,65 | |

Sumber: Disparbud,2025



Dalam rangka Meningkatkan pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Tujuan utama adalah meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal dengan indikator pendukung yaitu Proporsi PDRB Ekonomu Kreatif yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya mencapai angka pada tahun 1,14 pada tahun 2025 menjadi 1,29 % pada Tahun 2030, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dari 1,11 % pada Tahun 2025 menjadi 1,41% pada Tahun 2030 dan Indeks kemajuan kebudayaan dari 1,41 pada tahun 2025 menjadi 5 pada tahun 2030

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya daya saing sektor pariwisata yang diukur dengan cakupan persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan. Targetnya adalah 24 % pada tahun 2025 dan 29 pada 2030. kemudian, Disparbud ingin meningkatkan kualitas ekonomi kreatif yang diukur dengan indikator persentase perluasan produk kreatif baik dipasar domestik maupun ekspor. Targetnya adalah dari 5 % di tahun 2025 menjadi 10 % setiap tahunnya. Selanjutnya Disparbud ingin agar terwujudnya berkebudayaan maju yang diukur dengan indikator persentase pembangunan kebudayaan. Targetnya adalah 80 % pada tahun 2025 menjadi 100 % pada 2030.

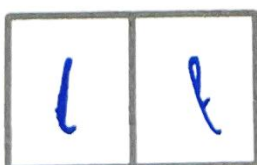
Disparbud juga akan meningkatnya Tata kelola organisasi yang diukur dengan indeks kepuasan aparatur . Targetnya adalah meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD dari 73,15 pada Tahun 2025 menjadi 75.65 pada Tahun 2030. Dengan demikian, Disparbud memiliki beberapa sasaran yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan, dan akan terus memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai.

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perlu memperhatikan permasalahan, isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Disamping itu juga perlu memperhatikan keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan bagaimana cara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

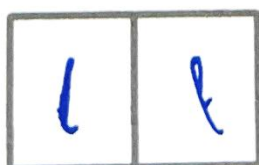


mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Penetapan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diharapkan dapat menjadi arahan dan pedoman serta dorongan bagi setiap aktivitas ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata | Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional; |
| | | Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional; |
| | | Penguatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam mendukung pembangunan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi sentra agrikultur nasional; |
| | | Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pariwisata; |
| | | Stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata, |
| | | Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial |
| | | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) |
| | | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal |

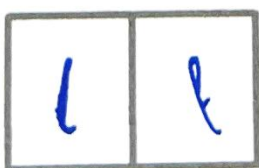


| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| | | Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan |
| | | Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara |
| | | Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata) |
| | | Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia |
| | | Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata |
| | | Pengembangan Agrowisata |
| | Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif | Penguatan Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| | | Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif |
| | | Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif |
| Misi 3 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya | Terwujudnya berkebudayaan maju | Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal |

Sumber: Disparbud 2025

3.2.2. Penahapan Renstra

Penahapan Renstra (Rencana Strategis) merupakan pembagian pelaksanaan program, kegiatan, atau strategi ke dalam beberapa tahap waktu tertentu selama periode Renstra. Tujuannya agar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi bisa lebih terarah, realistis, dan terukur dari tahun ke tahun. Yaitu dengan penguraian target dan kegiatan dalam Renstra ke dalam tahapan waktu (misalnya per tahun) sehingga terlihat roadmap pencapaiannya.



TABEL 3.3
PENAHAPAN RENSTRA

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP IV (2029) | Tahun V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional | Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional | Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional | Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional | Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan agrikultur nasional |
| Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra | Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra | Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra | Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra | Penguatan kolaborasi dan interaksi sektor pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra |
| Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pariwisata | Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pariwisata | Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pariwisata | Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pariwisata | Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pariwisata |
| Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial | Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial | Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial | Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial | Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial |
| Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) |
| Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal |
| Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan | Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan | Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan | Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan | Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan |



TABEL 3.3
PENAHAPAN RENSTRA

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP IV (2029) | Tahun V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan | industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan | industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan | industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan | industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan |
| Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara | Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara | Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara | Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara | Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara |
| Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata) | Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata) | Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata) | Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata) | Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata) |
| Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia | Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia | Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia | Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia | Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia |
| Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata | Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata | Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata | Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata | Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata |
| Pengembangan Agrowisata | Pengembangan Agrowisata | Pengembangan Agrowisata | Pengembangan Agrowisata | Pengembangan Agrowisata |
| Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM | Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM | Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM | Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM | Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM |
| Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual | Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual | Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual | Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual | Peningkatam pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual |
| Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota | Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota | Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota | Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota | Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota |



TABEL 3.3
PENAHAPAN RENSTRA

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP IV (2029) | Tahun V (2030) |
|--|--|--|--|--|
| kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif | kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif | kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif | kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif | kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif |
| Peningkatam pemanfaatan digitalisasi | Peningkatam pemanfaatan digitalisasi | Peningkatam pemanfaatan digitalisasi | Peningkatam pemanfaatan digitalisasi | Peningkatam pemanfaatan digitalisasi |
| Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix | Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix | Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix | Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix | Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix |
| Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya | Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya | Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya | Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya | Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya |
| Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif | Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif | Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif | Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif | Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif |
| Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif | Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif | Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif | Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif | Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif |
| Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat. | Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat. | Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat. | Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat. | Penguatan regulasi dan pelatihan manajemen kelembagaan adat. |
| Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan organisasi masyarakat sebagai benteng sosial. | Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan organisasi masyarakat sebagai benteng sosial. | Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan organisasi masyarakat sebagai benteng sosial. | Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan organisasi masyarakat sebagai benteng sosial. | Memberdayakan lembaga adat, karang taruna, kelompok seni, dan organisasi masyarakat sebagai benteng sosial. |



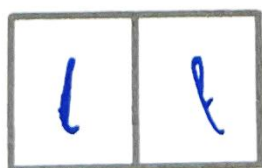
TABEL 3.3
PENAHAPAN RENSTRA

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP (2028) | TAHAP IV (2029) | Tahun V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal | Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal | Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal | Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal | Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal |

Sumber: Disparbud, 2025

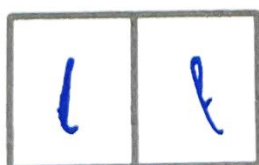
Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan

| OPERSIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET |
|--|---|---|-----|
| -Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai-nilai agama berlandaskan ABS SBK - Meningkatkan pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal | Meningkatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah | Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal | |
| | Meningkatkan daya saing ekonomi kreatif | Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Ekonomi Kreatif | |
| | | Peningkatan pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual | |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif | |
| | | Peningkatan pemanfaatan digitalisasi | |
| | | Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix | |
| | | Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya | |
| | | Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif | |
| | | Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif | |
| | Meningkatkan daya saing pariwisata | Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial | |
| | | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) | |
| | | Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal | |
| | | Penguatan integrasi | |



| OPERSIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET |
|-------------------------|----------------------------|---|-----|
| | | Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan | |
| | | Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara | |
| | | Pengembangan wisata Prioritas (Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Danau Kembar dan Danau Talang, Geopark, THKW dan Desa Wisata) | |
| | | Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Talang Berkelas Dunia | |
| | | Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata | |
| | | Pengembangan Agrowisata | |

Sumber : Disparbud, 2025

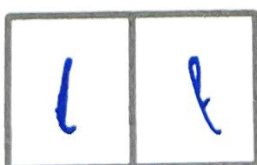


BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

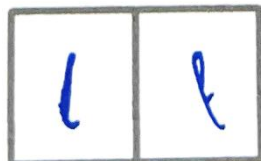
Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sesuai Program RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 didukung oleh 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 4 (empat) Program Urusan Pariwisata dan 3 (tiga) Urusan Kebudayaan yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Urusan Pariwisata
Urusan Pariwisata terdiri dari 4 (empat) program yaitu :
 - a) Program Pemasaran Pariwisata
 - b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - c) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Program Urusan Kebudayaan
 - a) Program Pengembangan Kebudayaan
 - b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - c) Program Pelestarian dan Pengeolaan Cagar Budaya

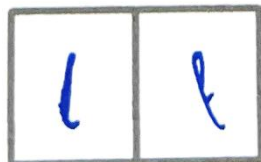


TABEL 4.1
Teknik Perumusan Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

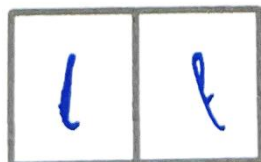
| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|---|---|--|--|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| 3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | | | | | |
| Meningkatnya pemerataan pendapatan berbasis potensi lokal | Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal | | | | Cakupan Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif (%) | | |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi nilai-nilai agama berlandaskan ABS SBK | | Meningkatnya daya saing sektor pariwisata | | | Indek kemajuan kebudayaan (Indeks (Skala 0-100)) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | | |
| | | | meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | | persentase pertumbuhan industri pariwisata (%) | 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | |
| | | | | | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | |
| | | | | Terkelolanya daya tarik destinasi pariwisata | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |



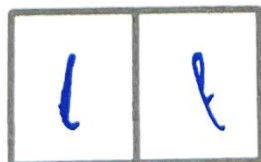
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---|--|--|
| | | | | | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) | 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) | 3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terkelolanya kawasan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan | 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |



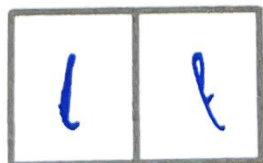
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---|---|--|
| | | | | strategis pariwisata | Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | | |
| | | | | | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang) | 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) | 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) | 3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |



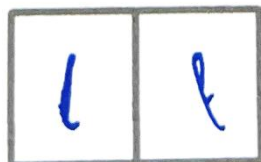
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang) | 3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | terkelolanya destinasi pariwisata | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |



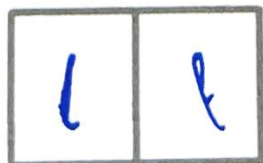
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | | |
| | | | | | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) | 3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |



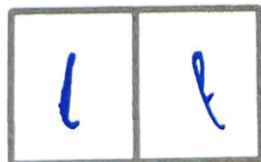
| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen) | 3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terlaksananya penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan) | 3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) | 3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) | 3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan) | 3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota | |
| | | | meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | |



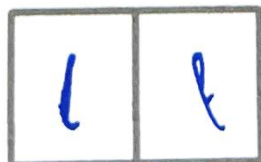
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Terlaksananya pemasaran pariwisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan destinasi wisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) | 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) | 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | |
| | | | | | | | |



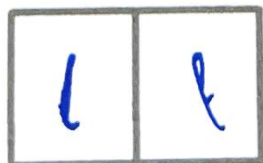
| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) | 3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | |
| | | | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) | 3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | |
| | | Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif | | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) | | |
| | | | meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | | persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%) | 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |
| | | | | | Persentase perluasan produk kreatif baik di pasar domestik maupun pasar ekspor (%) | 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | |
| | | | | Tersedianya prasarana kreatif di Kabupaten Solok | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit) | 3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit) | 3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | |



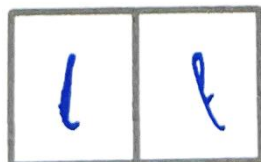
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Terbentuknya Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen) | 3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga) | 3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) | 3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi) | 3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga) | 3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen) | 3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual | |
| | | | | | Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi) | 3.26.04.2.02.0017 - Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku | 3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | |



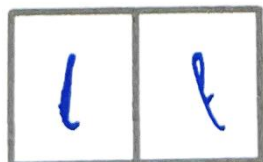
| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) | | |
| | | | meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | | persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%) | 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | |
| | | | | | Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi (%) | 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | |
| | | | | Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan) | 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | |
| | | | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) | 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | |
| | | | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) | 3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | |



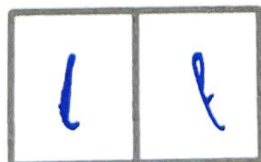
| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan) | 3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |
| | | | | terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | |
| | | Terwujudnya berkebudayaan maju | | | persentase pembangunan kebudayaan (%) | | |
| | | | meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | |
| | | | | Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |



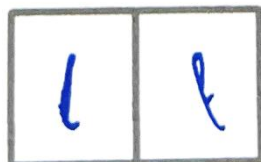
| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang) | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | |
| | | | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | |
| | | | | | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) | 2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhirkan, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang) | 2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan | |
| | | | | | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) | 2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan | |
| | | | meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | | Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan (%) | 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | |
| | | | | Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam kesenian | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |



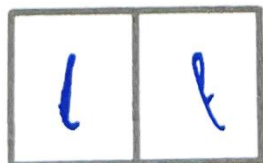
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) | 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) | 2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | |
| | | | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | |
| | | | meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | |
| | | | | Tersedianya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | 2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |



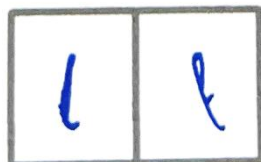
| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit) | 2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit) | 2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | 2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | |
| | | | meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | |
| | | | | | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | |
| | | | | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) | 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya | |



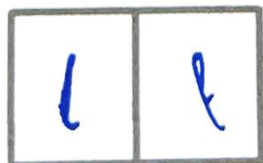
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) | 2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | |
| | | | | Terlaksananya pengelolaan cagar budaya | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek) | 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) | 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) | 2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya | |
| | | | | | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek) | 2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan | |
| | | | | terlaksananya Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan) | 2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek) | 2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |



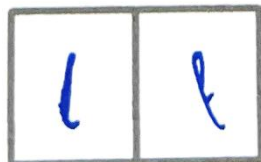
| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek) | 2.22.05.2.03.0001 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan) | 2.22.05.2.03.0002 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | meningkatnya tata kelola museum | | Persentase kunjungan wisatawan ke museum (%) | 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | |
| | | | | terkelolanya museum di kabupaten/kota | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit) | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan) | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang) | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |



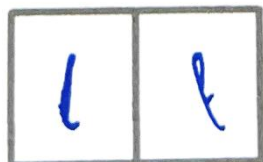
| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | | |
| | | | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit) | 2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | |
| | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | 2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | |
| | | | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | 2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | |
| | | | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) | 2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum | |
| | | | | | Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan) | 2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang) | 2.22.06.2.01.0015 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum | |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | | |
| | | | Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan | | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%) | 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |



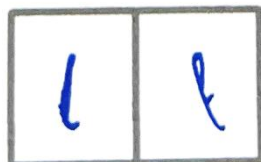
| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|--|---|--|
| | | | perangkat daerah | | | | |
| | | | | Tercapai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan realisasi Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | Terpenuhinya Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | Terpenuhinyan Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 3.26.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan pemerintah daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |

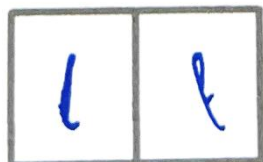


| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3.26.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | | | | Terpenuhinya jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang | 3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |



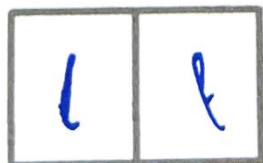
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |

Sumber: Disparbud, 2025

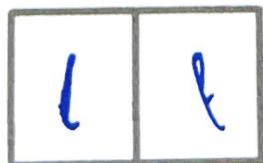


TABEL 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

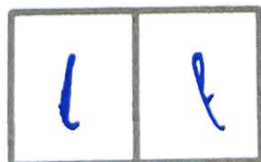
| URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BAS ELI NE TAH UN 202 4 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TAR GET | PAGU | TAR GET | PAGU | TAR GET | PAGU | TARG ET | PAGU | TAR GET | PAGU |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 275.000.000,00 | | 1.475.000.000,00 | | 1.475.000.000,00 | | 1.475.000.000,00 | | 1.475.000.000,00 |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | 100.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 |
| meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 40 | 100 | 100.000.000,00 | 100 | 800.000.000,00 | 100 | 800.000.000,00 | 100 | 800.000.000,00 | 100 | 800.000.000,00 |
| 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 |
| Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang) | 40 | 40 | 100.000.000,00 | 40 | 800.000.000,00 | 40 | 800.000.000,00 | 40 | 800.000.000,00 | 40 | 800.000.000,00 |
| | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | z | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | |
| | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) | 58 | 58 | | 60 | | 60 | | 65 | | 65 | |



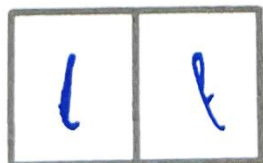
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 10 | 15 | | 20 | | 20 | | 25 | | 25 | |
| | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) | 1 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 10 | 15 | 0,00 | 20 | 0,00 | 20 | 0,00 | 25 | 0,00 | 25 | 0,00 |
| 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | 100.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 |
| Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 40 | 45 | 100.000.000,00 | 50 | 800.000.000,00 | 55 | 800.000.000,00 | 60 | 800.000.000,00 | 65 | 800.000.000,00 |
| 2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen) | 1 | 3 | 0,00 | 4 | 0,00 | 5 | 0,00 | 6 | 0,00 | 7 | 0,00 |



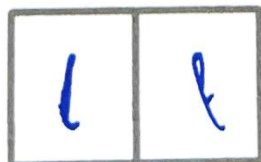
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang) | 40 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| 2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) | 58 | 58 | 0,00 | 60 | 0,00 | 60 | 0,00 | 65 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | 100.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 |
| meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan (%) | 50 | 70 | 100.000.000,00 | 80 | 600.000.000,00 | 90 | 600.000.000,00 | 100 | 600.000.000,00 | 100 | 600.000.000,00 |
| 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 100.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 |
| Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam kesenian | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) | 48 | 50 | 100.000.000,00 | 50 | 600.000.000,00 | 60 | 600.000.000,00 | 60 | 600.000.000,00 | 65 | 600.000.000,00 |
| | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 40 | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | | 100 | |
| | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan | 48 | 50 | | 50 | | 55 | | 55 | | 60 | |



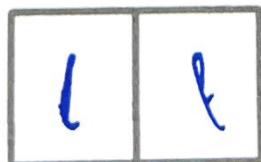
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|-----|----------------|
| | dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | | | | | | | | | | | |
| 2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 48 | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 | 55 | 0,00 | 55 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| 2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) | 48 | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 | 60 | 0,00 | 60 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| 2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | 100.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 | | 600.000.000,00 |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 40 | 60 | 100.000.000,00 | 70 | 600.000.000,00 | 80 | 600.000.000,00 | 90 | 600.000.000,00 | 100 | 600.000.000,00 |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | 0 | 30 | 10.000.000,00 | 35 | 10.000.000,00 | 40 | 10.000.000,00 | 45 | 10.000.000,00 | 60 | 10.000.000,00 |



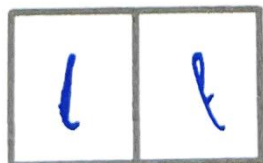
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| Tersedianya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 0 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 |
| | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| 2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | 1 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 |



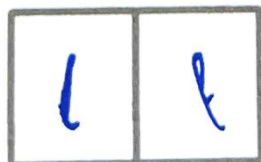
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 |
| meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 16 | 20 | 55.000.000,00 | 25 | 55.000.000,00 | 35 | 55.000.000,00 | 40 | 55.000.000,00 | 45 | 55.000.000,00 |
| | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 10 | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | |
| 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 |
| Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) | 14 | 15 | 55.000.000,00 | 15 | 55.000.000,00 | 20 | 55.000.000,00 | 20 | 55.000.000,00 | 20 | 55.000.000,00 |
| | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 89 | 90 | | 90 | | 95 | | 95 | | 95 | |
| | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 10 | 15 | | 25 | | 35 | | 40 | | 45 | |
| 2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) | 89 | 90 | 0,00 | 90 | 0,00 | 95 | 0,00 | 95 | 0,00 | 95 | 0,00 |
| 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya | | | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 |
| Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 10 | 15 | 55.000.000,00 | 25 | 55.000.000,00 | 35 | 55.000.000,00 | 40 | 55.000.000,00 | 45 | 55.000.000,00 |
| 2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda | 14 | 15 | 0,00 | 15 | 0,00 | 20 | 0,00 | 20 | 0,00 | 20 | 0,00 |



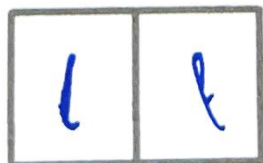
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|------|
| | yang Diusulkan (Objek) | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Terlaksananya pengelolaan cagar budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 10 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 10 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) | 10 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



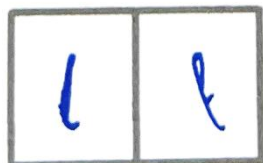
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) | 10 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek) | 10 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| terlaksananya Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2.22.05.2.03.0001 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2.22.05.2.03.0002 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



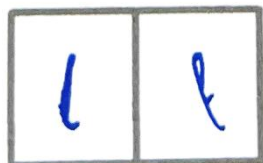
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|
| dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| meningkatnya tata kelola museum | Pesentase kunjungan wisatawan ke museum (%) | 0 | 0 | 10.000.000,00 | 10 | 10.000.000,00 | 15 | 10.000.000,00 | 20 | 10.000.000,00 | 30 | 10.000.000,00 |
| 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| terkelolanya museum di kabupaten/kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 0 | 0 | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 |
| | Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan) | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang) | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | 5 | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu | 0 | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 | |



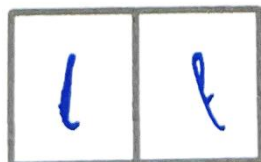
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | dan Kapasitasnya (Orang) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| 2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | 1 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 |



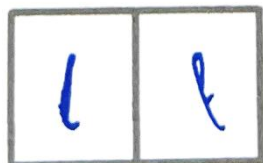
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|----|------------------|
| 2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum | Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum | Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 2.22.06.2.01.0015 - Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum | Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum (Orang) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | 5.518.501.922,00 | | 6.882.163.281,00 | | 6.892.597.199,00 | | 6.903.240.783,00 | | 6.914.004.309,00 |



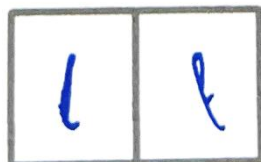
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 4.383.501.922,00 | | 4.367.163.281,00 | | 4.377.597.199,00 | | 4.388.240.783,00 | | 4.399.004.309,00 |
| Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%) | 100 | 100 | 4.383.501.922,00 | 100 | 4.367.163.281,00 | 100 | 4.377.597.199,00 | 100 | 4.388.240.783,00 | 100 | 4.399.004.309,00 |
| 3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 309.463.939,00 | | 285.183.798,00 | | 283.786.000,00 | | 278.144.515,00 | | 269.500.781,00 |
| Tercapai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan realisasi Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 309.463.939,00 | 1 | 285.183.798,00 | 1 | 283.786.000,00 | 1 | 278.144.515,00 | 1 | 269.500.781,00 |
| 3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 309.463.939,00 | | 285.183.798,00 | | 283.786.000,00 | | 278.144.515,00 | | 269.500.781,00 |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 309.463.939,00 | 1 | 285.183.798,00 | 1 | 283.786.000,00 | 1 | 278.144.515,00 | 1 | 269.500.781,00 |
| 3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.179.684.544,00 | | 3.179.545.333,00 | | 3.180.157.049,00 | | 3.185.233.107,00 | | 3.190.366.367,00 |



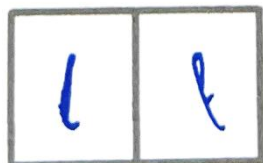
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|
| Terpenuhinya Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 31 | 31 | 3.179.684.544,00 | 31 | 3.179.545.333,00 | 31 | 3.180.157.049,00 | 31 | 3.185.233.107,00 | 31 | 3.190.366.367,00 |
| 3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3.179.684.544,00 | | 3.179.545.333,00 | | 3.180.157.049,00 | | 3.185.233.107,00 | | 3.190.366.367,00 |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 31 | 31 | 3.179.684.544,00 | 31 | 3.179.545.333,00 | 31 | 3.180.157.049,00 | 31 | 3.185.233.107,00 | 31 | 3.190.366.367,00 |
| 3.26.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terpenuhinyan Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 395.967.676,00 | | 396.199.287,00 | | 396.419.287,00 | | 396.628.298,00 | | 388.902.298,00 |
| Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan pemerintah daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 395.967.676,00 | 1 | 396.199.287,00 | 1 | 396.419.287,00 | 1 | 396.628.298,00 | 1 | 388.902.298,00 |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Paket Barang Cetak dan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



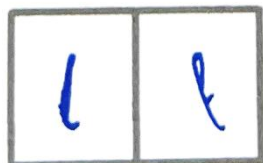
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.862.015,00 | | 1.900.000,00 | | 1.920.000,00 | | 1.930.000,00 | | 1.950.000,00 |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 1.862.015,00 | 1 | 1.900.000,00 | 1 | 1.920.000,00 | 1 | 1.930.000,00 | 1 | 1.950.000,00 |
| 3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.546.859,00 | | 9.546.859,00 | | 9.546.859,00 | | 9.546.859,00 | | 9.546.859,00 |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 9.546.859,00 | 1 | 9.546.859,00 | 1 | 9.546.859,00 | 1 | 9.546.859,00 | 1 | 9.546.859,00 |
| 3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 8.706.504,00 | | 8.800.000,00 | | 8.900.000,00 | | 9.000.000,00 | | 9.100.000,00 |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 8.706.504,00 | 1 | 8.800.000,00 | 1 | 8.900.000,00 | 1 | 9.000.000,00 | 1 | 9.100.000,00 |
| 3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 9.546.859,00 | | 9.646.989,00 | | 9.746.989,00 | | 9.846.000,00 | | 2.000.000,00 |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 9.546.859,00 | 1 | 9.646.989,00 | 1 | 9.746.989,00 | 1 | 9.846.000,00 | 1 | 2.000.000,00 |



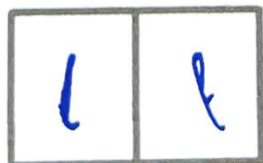
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 366.305.439,00 | | 366.305.439,00 | | 366.305.439,00 | | 366.305.439,00 | | 366.305.439,00 |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 366.305.439,00 | 1 | 366.305.439,00 | 1 | 366.305.439,00 | 1 | 366.305.439,00 | 1 | 366.305.439,00 |
| 3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |



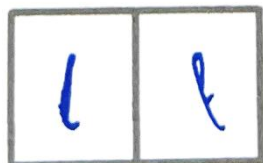
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 3.26.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 105.234.863,00 | | 105.234.863,00 | | 105.234.863,00 | | 105.234.863,00 | | 105.234.863,00 |
| Terpenuhinya jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 105.234.863,00 | 1 | 105.234.863,00 | 1 | 105.234.863,00 | 1 | 105.234.863,00 | 1 | 105.234.863,00 |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 103.434.863,00 | | 103.434.863,00 | | 103.434.863,00 | | 103.434.863,00 | | 103.434.863,00 |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 103.434.863,00 | 1 | 103.434.863,00 | 1 | 103.434.863,00 | 1 | 103.434.863,00 | 1 | 103.434.863,00 |



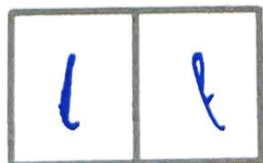
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| 3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 1 | 1.800.000,00 | 1 | 1.800.000,00 | 1 | 1.800.000,00 | 1 | 1.800.000,00 | 1 | 1.800.000,00 |
| 3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 393.150.900,00 | | 401.000.000,00 | | 412.000.000,00 | | 423.000.000,00 | | 445.000.000,00 |
| Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | 8 | 393.150.900,00 | 8 | 401.000.000,00 | 8 | 412.000.000,00 | 8 | 423.000.000,00 | 8 | 445.000.000,00 |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) | 11 | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| 3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 175.150.900,00 | | 176.000.000,00 | | 177.000.000,00 | | 178.000.000,00 | | 180.000.000,00 |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | 8 | 175.150.900,00 | 8 | 176.000.000,00 | 8 | 177.000.000,00 | 8 | 178.000.000,00 | 8 | 180.000.000,00 |
| 3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000,00 | | 45.000.000,00 | | 50.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 65.000.000,00 |



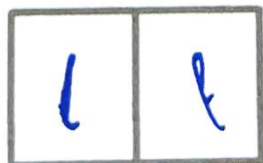
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 45.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 55.000.000,00 | 1 | 65.000.000,00 |
| 3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 178.000.000,00 | | 180.000.000,00 | | 185.000.000,00 | | 190.000.000,00 | | 200.000.000,00 |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 11 | 11 | 178.000.000,00 | 11 | 180.000.000,00 | 11 | 185.000.000,00 | 11 | 190.000.000,00 | 11 | 200.000.000,00 |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | 200.000.000,00 | | 900.000.000,00 | | 900.000.000,00 | | 900.000.000,00 | | 900.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 43,36 | 25 | 200.000.000,00 | 26 | 900.000.000,00 | 27 | 900.000.000,00 | 28 | 900.000.000,00 | 29 | 900.000.000,00 |
| | persentase pertumbuhan industri pariwisata (%) | 13,64 | 22,73 | | 27,27 | | 31,66 | | 36,36 | | 40,91 | |
| 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | 95.000.000,00 | | 446.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 |
| Terkelolanya daya tarik destinasi pariwisata | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) | 40 | 40 | 95.000.000,00 | 40 | 446.000.000,00 | 40 | 445.000.000,00 | 40 | 445.000.000,00 | 40 | 445.000.000,00 |
| | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



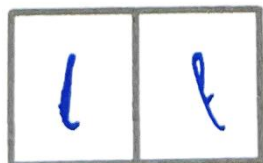
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | 47.500.000,00 | | 223.000.000,00 | | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 |
| Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 3 | 3 | 47.500.000,00 | 3 | 223.000.000,00 | 3 | 222.500.000,00 | 3 | 222.500.000,00 | 3 | 222.500.000,00 |
| 3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



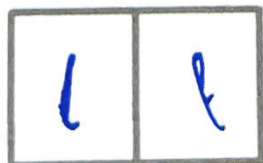
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) | 40 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| 3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | 47.500.000,00 | | 223.000.000,00 | | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 |
| Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 47.500.000,00 | 1 | 223.000.000,00 | 1 | 222.500.000,00 | 1 | 222.500.000,00 | 1 | 222.500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 95.000.000,00 | | 446.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 | | 445.000.000,00 |



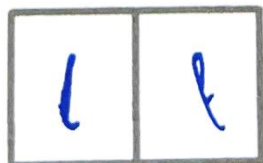
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| Terkelolanya kawasan strategis pariwisata | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang) | 40 | 40 | 95.000.000,00 | 40 | 446.000.000,00 | 40 | 445.000.000,00 | 40 | 445.000.000,00 | 40 | 445.000.000,00 |
| | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.26.02.2.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 47.500.000,00 | | 223.000.000,00 | | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 |



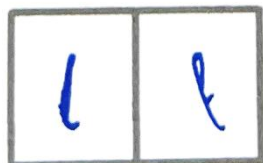
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | 3 | 47.500.000,00 | 3 | 223.000.000,00 | 3 | 222.500.000,00 | 3 | 222.500.000,00 | 3 | 222.500.000,00 |
| 3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |



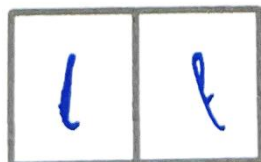
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| 3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 47.500.000,00 | | 223.000.000,00 | | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 | | 222.500.000,00 |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang) | 40 | 40 | 47.500.000,00 | 40 | 223.000.000,00 | 40 | 222.500.000,00 | 40 | 222.500.000,00 | 40 | 222.500.000,00 |
| 3.26.02.2.02.0009 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| terkelolanya destinasi pariwisata | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 1 | 3.000.000,00 | 1 | 3.000.000,00 | 1 | 3.000.000,00 | 1 | 3.000.000,00 | 1 | 3.000.000,00 |
| | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



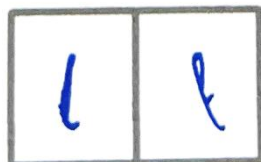
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) | 3 | 3 | 3.000.000,00 | 3 | 3.000.000,00 | 3 | 3.000.000,00 | 3 | 3.000.000,00 | 3 | 3.000.000,00 |



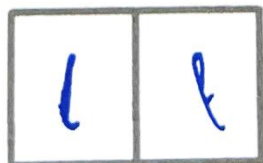
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |



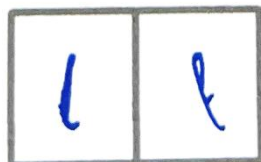
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| 3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) | 3 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | | 7.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| Terlaksananya penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan | 0 | 3 | 7.000.000,00 | 3 | 5.000.000,00 | 3 | 7.000.000,00 | 3 | 7.000.000,00 | 3 | 7.000.000,00 |



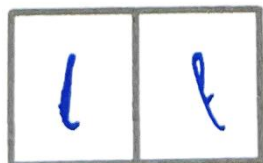
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| | diawasi (Usaha Pariwisata) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota | | | | 7.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE | Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) | 0 | 3 | 7.000.000,00 | 3 | 5.000.000,00 | 3 | 7.000.000,00 | 3 | 7.000.000,00 | 3 | 7.000.000,00 |
| 3.26.02.2.04.0012 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | 410.000.000,00 | | 490.000.000,00 | | 490.000.000,00 | | 490.000.000,00 | | 490.000.000,00 |
| meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 9 | 15 | 410.000.000,00 | 20 | 490.000.000,00 | 25 | 490.000.000,00 | 30 | 490.000.000,00 | 35 | 490.000.000,00 |



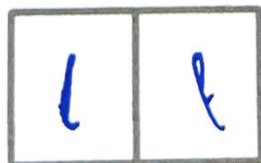
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 410.000.000,00 | | 490.000.000,00 | | 490.000.000,00 | | 490.000.000,00 | | 490.000.000,00 |
| Terlaksananya pemasaran pariwisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan destinasi wisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) | 1 | 1 | 410.000.000,00 | 1 | 490.000.000,00 | 1 | 490.000.000,00 | 1 | 490.000.000,00 | 1 | 490.000.000,00 |
| | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 23.012.783,00 | | 62.778.621,00 | | 62.778.621,00 | | 62.778.621,00 | | 62.778.621,00 |
| Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan | 1 | 1 | 23.012.783,00 | 1 | 62.778.621,00 | 1 | 62.778.621,00 | 1 | 62.778.621,00 | 1 | 62.778.621,00 |



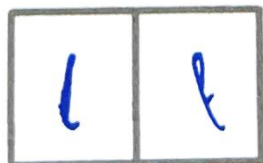
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| 3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | 1.051.135,00 | | 2.987.783,00 | | 2.987.783,00 | | 2.987.783,00 | | 2.987.783,00 |
| Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 1 | 1 | 1.051.135,00 | 1 | 2.987.783,00 | 1 | 2.987.783,00 | 1 | 2.987.783,00 | 1 | 2.987.783,00 |
| 3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | 20.000.000,00 | | 38.723.136,00 | | 38.723.136,00 | | 38.723.136,00 | | 38.723.136,00 |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) | 1 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 38.723.136,00 | 1 | 38.723.136,00 | 1 | 38.723.136,00 | 1 | 38.723.136,00 |
| 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 270.936.082,00 | | 280.510.460,00 | | 280.510.460,00 | | 280.510.460,00 | | 280.510.461,00 |
| Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 1 | 1 | 270.936.082,00 | 1 | 280.510.460,00 | 1 | 280.510.460,00 | 1 | 280.510.460,00 | 1 | 280.510.461,00 |
| 3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 95.000.000,00 | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 | | 104.999.999,00 |
| Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media | 1 | 1 | 95.000.000,00 | 1 | 105.000.000,00 | 1 | 105.000.000,00 | 1 | 105.000.000,00 | 1 | 104.999.999,00 |



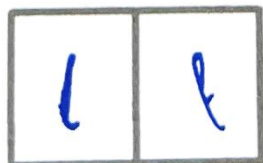
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| | Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) | | | | | | | | | | | |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | 200.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 |
| meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%) | 8 | 15 | 200.000.000,00 | 20 | 800.000.000,00 | 25 | 800.000.000,00 | 30 | 800.000.000,00 | 35 | 800.000.000,00 |
| | Persentase perluasan produk kreatif baik di pasar domestik maupun pasar ekspor (%) | 4 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya prasarana kreatif di Kabupaten Solok | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit) | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit) | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | 200.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 | | 800.000.000,00 |
| Terbentuknya Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan | 0 | 0 | 200.000.000,00 | 1 | 800.000.000,00 | 1 | 800.000.000,00 | 1 | 800.000.000,00 | 2 | 800.000.000,00 |



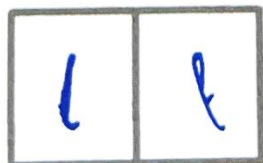
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga) | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah | | | | 100.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 |
| Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah | Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga) | 3 | 4 | 100.000.000,00 | 4 | 400.000.000,00 | 4 | 400.000.000,00 | 4 | 400.000.000,00 | 4 | 400.000.000,00 |
| 3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |



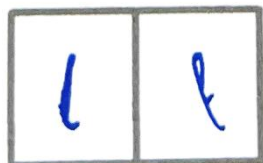
| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual | Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| 3.26.04.2.02.0017 - Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif | | | | 100.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 | | 400.000.000,00 |
| Terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif | Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi) | 3 | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 400.000.000,00 | 3 | 400.000.000,00 | 3 | 400.000.000,00 | 3 | 400.000.000,00 |
| 3.26.04.2.02.0022 - Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 |
| meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi (%) | 5 | 15 | 325.000.000,00 | 20 | 325.000.000,00 | 25 | 325.000.000,00 | 30 | 325.000.000,00 | 35 | 325.000.000,00 |
| | persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%) | 5 | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | |
| 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 | | 325.000.000,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan) | 1 | 1 | 325.000.000,00 | 1 | 325.000.000,00 | 1 | 325.000.000,00 | 1 | 325.000.000,00 | 1 | 325.000.000,00 |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) | 40 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 120 | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
| 3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | 162.500.000,00 | | 162.500.000,00 | | 162.500.000,00 | | 162.500.000,00 | | 162.500.000,00 |
| Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 120 | 120 | 162.500.000,00 | 120 | 162.500.000,00 | 120 | 162.500.000,00 | 120 | 162.500.000,00 | 120 | 162.500.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | | 162.500.000,00 | | 162.500.000,00 | | 162.500.000,00 | | 162.500.000,00 | | 162.500.000,00 |
| Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) | 40 | 40 | 162.500.000,00 | 40 | 162.500.000,00 | 40 | 162.500.000,00 | 40 | 162.500.000,00 | 40 | 162.500.000,00 |

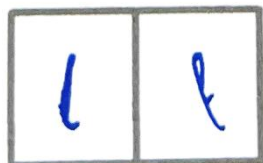


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 40 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| 3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Terlaksana Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 40 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40 | 0,00 |

Sumber: Disparbud, 2025

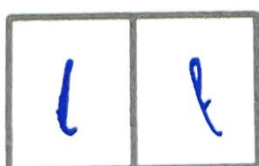


4.3. Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sub kegiatan dan kegiatan yang mendukung Program prioritas pembangunan daerah Disparbud Kabupaten Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

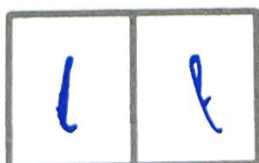
Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KET |
|----|--|---|--|-----|
| 1. | 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | |
| | | | 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | |
| 2. | 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | 2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | |
| 3. | 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | 2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | |
| 4. | 2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya | |
| 5. | 2.22.06 - Program Pengelolaan Permuseuman | Meningkatnya Tata Kelola Museum | 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | |
| 6. | 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN | meningkatnya daya tarik | 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |



| | DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | destinasi pariwisata | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | 3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.02.2.03.0008 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota | |
| 7. | 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| 8. | 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | 3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | |
| | | | 3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah | |
| | | | 3.26.04.2.02.0017 - Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif | |
| 9. | 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | |
| | | | 3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | |

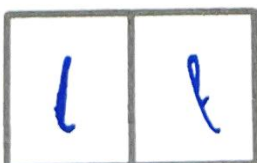
Sumber: Disparbud, 2025



4.4 Target Kinerja Renstra Disparbud

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sedangkan indikator kinerja adalah alat yang berfungsi sebagai pengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui indikator kinerja utama Disparbud. Indikator kinerja Disparbud merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

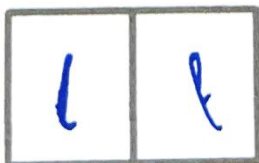
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapelitbang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Disparbud Kabupaten Solok 2025-2029

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|------|---|----------------------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1. | 3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | | | | | | | |
| 2. | Cakupan Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif | % | 2,18 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,71 | |
| 3. | Indek kemajuan kebudayaan | Indeks (Skala 0-100) | 99 | 1,41 | 1,93 | 3,25 | 3,94 | 4,47 | 5,00 | |
| 4. | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 1,025 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,42 | |
| 5. | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | % | 0 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,1 | 1,09 | 1,29 | |
| 6. | persentase pembangunan kebudayaan | % | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 72,60 | 73,15 | 73,65 | 74,15 | 74,65 | 75,15 | 75,65 | |

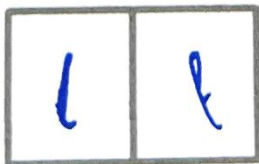
Sumber: Disparbud, 2025



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Disparbud Kabupaten Solok 2025-2029

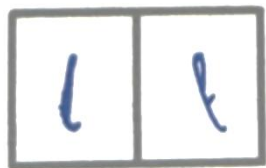
| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|--|------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 3.26.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | | | | | | | | |
| I ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) | Angka | 0,508 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 3 | |
| II ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| III INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | Persentase | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | |
| 2 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persentase | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 3 | Persentase kunjungan wisatawan ke museum | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 4 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Persentase | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | persentase pertumbuhan industri pariwisata | % | 13,64 | 18,18 | 22,73 | 27,27 | 31,66 | 36,36 | 40,91 | |
| 6 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | Persentase | 43,36 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 7 | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | Persentase | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 8 | persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | % | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 9 | Persentase perluasan produk kreatif baik di pasar domestik maupun pasar ekspor | % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 10 | persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 11 | Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| 12 | Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 13 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | Persentase | 0 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |

Sumber: Disparbud 2025



Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disparbud Kabupaten Solok 2025-2029

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|------|--|-----------|------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | |
| 2. | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | positif | Persentase | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | |
| 3. | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | | Persentase | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 4. | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | positif | Persentase | 0 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |
| 5. | Persentase kunjungan wisatawan ke museum | positif | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 6. | Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan | positif | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| 7. | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | positif | Persentase | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8. | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| 9. | persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | komulatif | % | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 10. | Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi | komulatif | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 11. | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | positif | Persentase | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 12. | Persentase perluasan produk kreatif baik di pasar domestik maupun pasar ekspor | komulatif | % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 13. | persentase pertumbuhan industri pariwisata | positif | % | 13,64 | 18,18 | 22,73 | 27,27 | 31,66 | 36,36 | 40,91 | |
| 14. | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | positif | Persentase | 43,36 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 15. | persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | komulatif | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Renstra Disparbud Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disparbud Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Disparbud Kabupaten Solok. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Disparbud Kabupaten Solok termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Disparbud Kabupaten Solok.

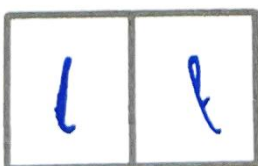
Renstra Disparbud Kabupaten Solok periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Disparbud Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Disparbud Kabupaten Solok Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Disparbud beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Disparbud Kabupaten Solok secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Disparbud Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, organisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Disparbud Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana

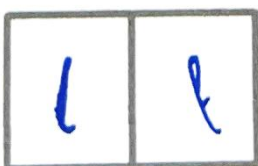


- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka panjang;
 - c. pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan;
 - e. akuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pimpinan;
 - f. pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan;
 - g. kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

- a. memantau progres pelaksanaan Renstra untuk memastikan bahwa target dan sasaran dapat dicapai;
- b. mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
- c. menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;



- d. mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra;
- e. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra; dan
- d. mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi perbaikan.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
 META DATA INDIKATOR
 RENSTRA DISPARBUD
 TAHUN 2025-2029

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Cakupan rasio DPRB (Domestic Regional Bruto) Penyediaan Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif

| | |
|--------------------|---|
| Nama Indikator | Cakupan rasio DPRB (Domestic Regional Bruto) Penyediaan Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif |
| Definisi | Perbandingan (rasio) antara nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta sektor/subsektor Ekonomi Kreatif terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu |
| Metode Perhitungan | Cakupan rasio DPRB (Domestic Regional Bruto) Penyediaan A.k Mamin dan Ekraf Cakupan Rasio = (Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektor Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif / Total NTB) x 100% Keterangan: - NTB Sektor Akomodasi Makan Minum dan Ekonomi Kreatif: Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor akomodasi, makan minum, dan ekonomi kreatif di suatu wilayah. - Total NTB: Total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor di suatu wilayah. |
| Interpretasi | Besarnya kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Ekonomi Kreatif terhadap total perekonomian daerah yang tercermin dalam PDRB.. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

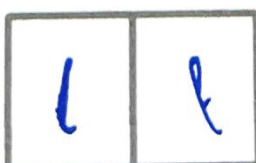
| | |
|--------------------|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) |
| Definisi | Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata. |
| Metode Perhitungan | $\frac{\text{Rasio PDRB Penyediaan Ak.mamin}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$ |



| | |
|--------------|--|
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) |
| Definisi | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor jasa lainnya terhadap PDRB ADHB. Dengan demikian, proporsi PDRB ekonomi kreatif adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif (sektor jasa lainnya) dari 17 subsektor yang termasuk : - Fesyen - Kuliner - Kriya - Film, Animasi dan video - Pengembang Permainan - Aplikasi - Musik - Seni Pertunjukan - Fotografi - Desain komunikasi Visual - Televisi dan Radio - Seni Rupa - Desain Produk - Periklanan - Penerbitan - Arsitektur - Desain interior |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\text{PDRB Sektor Jasa Lainnya}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sub sektor Jasa lainnya, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Suatu Daerah (Kabupaten). |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |



II. INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. Urusan Budaya

1. Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan

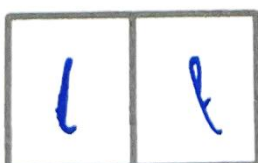
| | |
|-------------------|--|
| Nama Indikator | Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam pengembangan kebudayaan di suatu wilayah atau komunitas. |
| Rumus Perhitungan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain partisipasi dalam berbagai bentuk, seperti ide, tenaga, materi, dan pengambilan keputusan, serta pemanfaatan hasil kebudayaan |
| Interpretasi | Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan kebudayaan untuk generasi mendatang |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan

| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan/ dilestarikan |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan dalam suatu wilayah atau komunitas. |
| Rumus Perhitungan | Dihitung dari jumlah kesenian tradisional yang aktif dipentaskan atau diajarkan, dibagi dengan total kesenian tradisional yang ada di suatu daerah, kemudian dikalikan 100% |
| Interpretasi | Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan

| | |
|----------------|---|
| Nama Indikator | Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah sejarah lokal yang dilestarikan dan dipelihara dalam suatu wilayah atau komunitas |



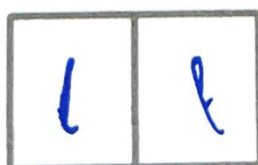
| | |
|-------------------|--|
| Rumus Perhitungan | Dihitung dari jumlah sejarah lokal yang dilestarikan dibagi total jumlah sejarah lokal yang ada di suatu wilayah dikalikan 100% |
| Interpretasi | Pelestarian sejarah lokal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang. |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

4. Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan Sejarah lokal

| | |
|-------------------|--|
| Nama Indikator | Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap tinjauan Sejarah lokal |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan tinjauan sejarah lokal. |
| Rumus Perhitungan | Dirumuskan dengan melihat beberapa aspek keterlibatan masyarakat dalam proses mencakup partisipasi aktif dalam pengumpulan data, penyampaian informasi, serta interpretasi dan penyebaran hasil tinjauan sejarah |
| Interpretasi | Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.. |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

5. Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan

| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya yang dilindungi dan dilestarikan. |
| Rumus Perhitungan | Dihitung dari jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan dengan total potensi cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ada di suatu wilayah dikalikan 100% |
| Interpretasi | Penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |



6. Persentase Museum yang didirikan dan dikelola

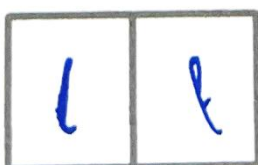
| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Persentase Museum yang didirikan dan dikelola |
| Definisi | ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi museum yang telah didirikan dan dikelola dengan baik dalam suatu wilayah atau komunitas |
| Rumus Perhitungan | Dihitung dari jumlah Museum yang didirikan dan dikelola dibagi dengan total jumlah museum dikalikan 100% |
| Interpretasi | Museum yang didirikan dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang. |
| Sumber Data | Perangkat daerah urusan kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

7. Persentase kunjungan wisatawan ke museum

| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Persentase kunjungan wisatawan ke museum |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi kunjungan wisatawan ke museum dalam suatu wilayah atau komunitas. |
| Rumus Perhitungan | Dihitung dari jumlah kunjungan wisatawan ke museum dibagi total kunjungan wisatawan) dikalikan 100% |
| Interpretasi | Data tentang persentase kunjungan wisatawan ke museum dapat membantu dalam perencanaan dan pengembangan museum serta destinasi wisata |
| Sumber Data | Perangkat daerah urusan kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

8. Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan

| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah budaya lokal yang dilestarikan, dikembangkan, dan dipromosikan dalam suatu wilayah atau komunitas |
| Rumus Perhitungan | Kuantitas budaya lokal yang dihidupkan kembali, dilestarikan, dan dikembangkan dalam berbagai bidang seperti seni, bahasa, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional |
| Interpretasi | Pengembangan budaya lokal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |



9. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu

| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dan efektif dalam suatu wilayah atau komunitas. |
| Rumus Perhitungan | Dihitung dari jumlah cagar budaya yang dikelola dengan melibatkan berbagai pihak terkait (pemerintah, masyarakat, dll.) dan menggunakan berbagai pendekatan (perlindungan, pemanfaatan, pengembangan) dibandingkan dengan total jumlah cagar budaya yang ada dikalikan 100% |
| Interpretasi | Pengelolaan cagar budaya secara terpadu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

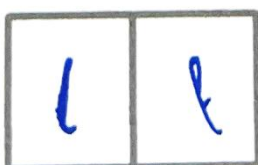
10. Persentase warisan budaya yang dilestarikan

| | |
|-------------------|--|
| Nama Indikator | Persentase warisan budaya yang dilestarikan |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi warisan budaya yang dilestarikan dan dipelihara dalam suatu wilayah atau komunitas. |
| Rumus Perhitungan | Dihitung dari jumlah warisan budaya yang telah dilindungi atau dijaga dari kerusakan atau kepunahan. dibagi total jumlah warisan budaya dikalikan 100% |
| Interpretasi | Pelestarian warisan budaya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

B. Urusan Pariwisata

1. Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan

| | |
|----------------|--|
| Nama Indikator | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan |
| Definisi | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur laju peningkatan atau penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya (bulanan, triwulanan, atau tahunan). Indikator ini mencerminkan dinamika sektor pariwisata dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah |



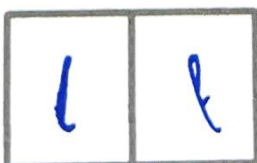
| | |
|-------------------|--|
| Rumus Perhitungan | Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%) = $\frac{\text{Jumlah kunjungan Tahun } n - \text{Jumlah kunjungan Tahun } n-1}{\text{Jumlah kunjungan Tahun } n-1} \times 100$ |
| Interpretasi | <ul style="list-style-type: none"> · Pertumbuhan positif (di atas 0%) → menandakan sektor pariwisata berkembang, daya tarik destinasi meningkat, dan promosi efektif. · Pertumbuhan stagnan (0%) → menunjukkan jumlah wisatawan tidak mengalami perubahan signifikan, biasanya akibat keterbatasan event atau promosi. · Pertumbuhan negatif (<0%) → jumlah wisatawan menurun, bisa disebabkan oleh faktor eksternal (bencana, krisis ekonomi, pandemi) atau internal (kurang promosi, fasilitas belum memadai). |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata

| | |
|-------------------|--|
| Nama Indikator | Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata |
| Definisi | Persentase Pertumbuhan Industri Pariwisata adalah indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan sektor usaha pariwisata di suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ini biasanya dihitung berdasarkan nilai tambah bruto sektor pariwisata, jumlah unit usaha pariwisata, pendapatan pariwisata, atau indikator turunannya (seperti pajak hotel/restoran, jumlah tenaga kerja pariwisata). |
| Rumus Perhitungan | Pertumbuhan Industri Pariwisata (%) = $\frac{\text{Nilai sektor pariwisata tahun sebelumnya} - \text{Nilai sektor pariwisata tahun berjalan}}{\text{Nilai sektor pariwisata tahun sebelumnya}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | <ul style="list-style-type: none"> · Pertumbuhan tinggi (>10%) → menunjukkan industri pariwisata berkembang pesat, peluang usaha meningkat, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin besar. · Pertumbuhan sedang (0–10%) → sektor pariwisata tumbuh stabil, perlu dorongan promosi dan inovasi agar lebih cepat berkembang. · Pertumbuhan negatif (<0%) → industri pariwisata mengalami penurunan, bisa disebabkan faktor eksternal (krisis, pandemi, bencana) maupun internal (fasilitas terbatas, promosi kurang efektif) |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata

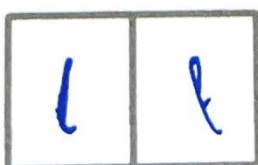
| | |
|----------------|---|
| Nama Indikator | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata |
|----------------|---|



| | |
|-------------------|---|
| Definisi | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perkembangan jumlah dan jenis media promosi/pemasaran pariwisata yang digunakan pemerintah daerah atau pelaku pariwisata dari satu periode ke periode berikutnya |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Peningkatan Media Pemasaran} = \frac{\text{Jumlah media pemasaran tahun sebelumnya} - \text{Jumlah media pemasaran tahun berjalan}}{\text{Jumlah media pemasaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | <ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan tinggi (>50%) → menunjukkan pemerintah/daerah sangat aktif mengembangkan strategi promosi dengan memperluas kanal/media pemasaran. · Peningkatan sedang (10–49%) → terdapat penambahan media, namun masih perlu inovasi agar daya jangkau promosi lebih luas. · Tidak ada peningkatan (0%) atau negatif → menunjukkan stagnasi atau berkurangnya upaya promosi, yang bisa berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan |

4. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual

| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual |
| Definisi | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (KI) adalah indikator untuk mengukur sejauh mana pelaku ekonomi kreatif di suatu daerah telah mendaftarkan, memiliki, dan melindungi hasil karyanya melalui hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, indikasi geografis, atau rahasia dagang |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif dengan KI} = \frac{\text{Jumlah total pelaku ekonomi kreatif}}{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat KI}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | <ul style="list-style-type: none"> · Tinggi (>50%) → menunjukkan kesadaran dan perlindungan KI di kalangan pelaku ekonomi kreatif sudah baik, daya saing produk meningkat, dan potensi ekonomi kreatif terlindungi secara hukum. · Sedang (20–49%) → sebagian pelaku sudah sadar pentingnya KI, namun mayoritas masih belum melindungi karya/produk mereka. · Rendah (<20%) → kesadaran dan perlindungan hukum sangat lemah, sehingga produk ekonomi kreatif rawan ditiru, dijiplak, atau tidak mendapat nilai tambah maksimal |
| Sumber | Perangkat Daerah Urusan Pariwisata |



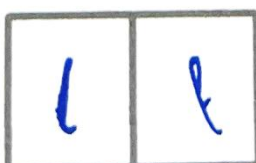
| | |
|-----------|---------|
| Data | |
| Frekuensi | Tahunan |

5. Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor

| | |
|-------------------|---|
| Nama Indikator | Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor |
| Definisi | Persentase Perluasan Produk Kreatif baik di Pasar Domestik maupun Pasar Ekspor adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana produk-produk ekonomi kreatif dari suatu daerah mampu meningkatkan jangkauan pasarnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Indikator ini dapat dihitung berdasarkan jumlah pelaku/produk yang berhasil masuk ke pasar baru dibandingkan dengan total pelaku/produk kreatif yang ada |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Perluasan Produk Kreatif} = \frac{\text{Jumlah total produk kreatif}}{\text{Jumlah produk kreatif yang berhasil masuk pasar baru (domestik/ekspor)}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | <ul style="list-style-type: none"> · Tinggi (>50%) → produk kreatif daerah memiliki daya saing tinggi, mampu menembus pasar nasional maupun internasional. · Sedang (20–49%) → produk kreatif mulai berkembang ke pasar baru, namun mayoritas masih dipasarkan di tingkat lokal. · Rendah (<20%) → produk kreatif masih terbatas pada pasar lokal, akses ekspor dan pasar domestik luas belum terbuka. |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan |

6. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi

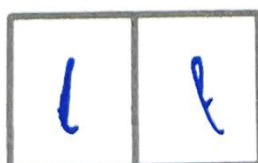
| | |
|-------------------|--|
| Nama Indikator | persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi |
| Definisi | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah indikator yang menggambarkan proporsi pelaku ekonomi kreatif yang masih menjalankan usaha secara berkelanjutan (aktif) serta telah tercatat/terverifikasi secara resmi (tervalidasi) oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait (misalnya Kemenparekraf, Dinas Pariwisata/Ekonomi Kreatif, OSS, atau sistem data pelaku ekraf). |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pelaku Ekraf Aktif dan Tervalidasi} = \frac{\text{Jumlah total pelaku ekraf terdata}}{\text{Jumlah pelaku ekraf yang aktif dan tervalidasi}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | <ul style="list-style-type: none"> · Tinggi (>70%) → mayoritas pelaku ekraf sudah tervalidasi dan aktif, menandakan ekosistem ekraf |



| | |
|-------------|--|
| | <p>yang sehat dan terpantau baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sedang (40–69%) → masih ada kesenjangan antara jumlah pelaku terdata dengan yang benar-benar aktif/terverifikasi. · Rendah (<40%) → banyak pelaku ekraf yang tidak aktif atau belum tervalidasi, menunjukkan lemahnya basis data dan pendampingan usaha. |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan |

7. Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi

| Nama Indikator | Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi |
|-------------------|--|
| Definisi | <p>Persentase Pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi pelaku usaha pariwisata yang:</p> <p>Aktif → masih beroperasi secara berkelanjutan (hotel, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata, homestay, desa wisata, dsb.), dan</p> <p>Tervalidasi → telah tercatat atau diverifikasi secara resmi oleh pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, atau asosiasi terkait (misalnya melalui perizinan OSS, registrasi Dinas Pariwisata, sertifikasi usaha, dsb.).</p> <p>Indikator ini penting untuk memastikan bahwa data pelaku pariwisata yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan benar-benar akurat, valid, serta mencerminkan kondisi riil lapangan.</p> |
| Rumus Perhitungan | <p>Persentase Pelaku Pariwisata Aktif dan Tervalidasi = $\frac{\text{Jumlah total pelaku pariwisata terdata}}{\text{Jumlah pelaku pariwisata yang aktif dan tervalidasi}} \times 100\%$</p> |
| Interpretasi | <ul style="list-style-type: none"> · Tinggi (>70%) → mayoritas pelaku pariwisata terdata benar-benar aktif dan tervalidasi; menunjukkan basis data yang kuat serta iklim pariwisata yang sehat. · Sedang (40–69%) → masih ada gap antara jumlah pelaku terdata dan yang benar-benar aktif/terverifikasi; perlu peningkatan validasi data dan pembinaan. · Rendah (<40%) → banyak pelaku pariwisata tidak aktif atau belum tervalidasi; mencerminkan lemahnya sistem pendataan dan potensi distorsi dalam kebijakan sektor pariwisata |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan |



8. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)

| | |
|--------------------|---|
| Nama Indikator | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) |
| Definisi | Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten. |
| Metode Perhitungan | <i>Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara</i> |
| Interpretasi | Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung di daerah maka akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. |
| Sumber Data | Perangkat Daerah Urusan Pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan |

